



POLICY PAPER
PENINGKATAN
KUALITAS LULUSAN SMK
DI MASA PANDEMI

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN DAN KINERJA

2020

PENGARAH :

Velix Vernando Wanggai

PENANGGUNG JAWAB :

Maya Grandty

TIM PENYUSUN :

Maya Grandty (Kontributor/editor)

Fajar Sumirat (Kontributor/editor)

Dian Maria Andriani (Kontributor/editor)

Jabbar Hidayatullah (Kontributor/editor)

Gusti Raganata (Kontributor)

Triasih Djuhartata (Kontributor)

INFORMASI LEBIH LANJUT :

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2

Gedung Wisma Bakrie 2 Lt. 19

bagian ini dikosongkan

ABSTRAK

Bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk, Indonesia terdampak dengan munculnya pandemi COVID-19. Pandemi yang menyebar secara global ini memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan *lockdown*. Kebijakan ini telah memicu krisis ekonomi di berbagai negara. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan *physical distancing*, karantina wilayah hingga PSBB yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah.

Pembelajaran dari rumah diarahkan menjadi pendidikan jarak jauh (PJJ) menggunakan sistem daring. Pemberlakuan PJJ menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan karena munculnya hambatan-hambatan dalam proses KBM serta mengubah bentuk proses pembelajaran siswa SMK yang biasanya 60% praktik dan 40% teori. Untuk pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif, SMK di semua zona dapat melakukannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol ini mencakup perhatian terhadap kondisi kelas, jumlah hari, dan jam pembelajaran dengan pembagian rombongan belajar yang ditentukan oleh satuan sekolah masing-masing dan kondisi medis warga SMK.

Namun tentu saja hal ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak yang berada di lingkungan satuan sekolah, dimulai dari Kepala Sekolah sebagai pengawas, tenaga pendidik sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, dan murid sebagai subjek kebijakan. Dengan segala kompleksitasnya, pembelajaran di SMK membutuhkan penyesuaian dengan tahapan-tahapan pandemi COVID-19. Tahapan tersebut antara lain: tahapan awal yang dikategorikan sebagai tahapan ketika seluruh sekolah dan bisnis tutup serta berada dalam darurat kesehatan (PSBB Ketat). Tahapan menengah dikategorikan sebagai tahapan PSBB transisi dimana sekolah dan bisnis mulai dibuka secara bertahap dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tahapan akhir atau pemulihan dimana vaksinasi sudah mulai diberikan dan sekolah serta bisnis mulai dibuka kembali.

bagian ini dikosongkan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
BAB 2 DINAMIKA KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN PENDIDIKAN VOKASI	9
2.1 Pembelajaran SMK Selama Pandemi	10
2.1.1 Pelaksanaan pembelajaran praktik di masa pandemi	10
2.1.2 Revitaliasi: pembentukan direktorat jenderal pendidikan vokasi	13
2.2 Kebijakan Industri Dalam Pembelajaran dan Praktik Kerja SMK: Sebelum dan Selama Pandemi	13
2.3 Analisis Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan PJJ SMK	14
BAB 3 KONDISI PEREKONOMIAN DAN KETENAGAKERJAAN LULUSAN SMK SEBELUM PANDEMI	19
3.1 Kondisi Perekonomian Sebelum dan Selama Masa Pandemi	20
3.1.1 Kondisi perekonomian secara umum	20
3.1.2 Kondisi industri pengolahan	23
3.2 Kondisi Ketenagakerjaan Lulusan SMK	26
3.2.1 Kondisi Pekerja Lulusan SMK: Sebelum Pandemi.....	26
3.2.2 Pekerja lulusan SMK menurut status pekerjaan	27
3.2.3 Kondisi perekonomian sektoral dan penyerapan pekerja lulusan SMK.....	27
BAB 4 KONDISI KETENAGAKERJAAN LULUSAN SMK PADA MASA PANDEMI	31
4.1 Kesenjangan <i>Skill</i> Lulusan SMK.....	32
4.2 Peningkatan Kualitas Lulusan SMK Melalui Tenaga Pendidik	34
4.3. Kebijakan Industri Nasional dan Implikasi Pada Pembelajaran SMK	35

4.4	Kondisi Ketenagakerjaan di Masa Pandemi dan Implikasinya Pada Pekerja Lulusan SMK	36
4.4.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	36
4.4.2	Pengangguran pendidikan SMK	37
4.4.3	Kondisi pekerja di masa pandemi	40
4.4.4	Estimasi pengaruh pandemi pada serapan pekerja lulusan SMK.....	41
BAB 5	REKOMENDASI	45
5.1	Kebijakan PJJ SMK dan Kebijakan Pemagangan	46
5.2	Perkembangan Ekonomi dan Penyerapan Pekerja Lulusan SMK.....	48
	DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Jumlah Pengangguran Lulusan SMK Per Februari 2016-2020.....	2
Gambar 1. 2	Persentase Pengangguran Lulusan SMK Terhadap Total Pengangguran Nasional 2016-2020.....	3
Gambar 1. 3	Provinsi dengan Lebih dari 20% Desa dan Jumlah Rumah Tangga Bukan Pengguna Listrik.....	5
Gambar 1. 4	Jumlah dan Lebih dari 60 % Desa yang Tidak Ada BTS.....	5
Gambar 1. 5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Genggam dan Komputer/Laptop di Provinsi Di Atas Rata-Rata Nasional.....	6
Gambar 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-on-Y) dan Kuartalan (Q-to-Q) 2017-2020.....	20
Gambar 3. 2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Y-O-Y di Triwulan III (Juli-September) 2020	21
Gambar 3. 3	Pertumbuhan Sektor 2019 dan y-o-y Triwulan III 2020	22
Gambar 3. 4	Struktur PDB Kuartal III Tahun 2019 dan 2020.....	22
Gambar 3. 5	Pertumbuhan Sektor Industri y-o-y 2011-2020 (%)......	24
Gambar 3. 6	Pertumbuhan Subsektor Industri 2011-2020	24
Gambar 3. 7	Pertumbuhan Industri 2011-2020	25
Gambar 3. 8	Persentase Pekerja Menurut Pendidikan 2014-2019.....	26
Gambar 3. 9	Serapan Pekerja Lulusan SMK dan Kondisi Perekonomian Sektor 2018.....	28
Gambar 4. 1	Kolaborasi Pengembangan Sumber daya Manusia	34
Gambar 4. 2	TPT dan Jumlah Pengangguran Pendidikan SMK (x1.000 orang)	39
Gambar 4. 3	TPT Pendidikan SMK 2020 dan Share PDRB Sektor Industri Menurut Provinsi	40
Gambar 4. 4	Jumlah Pekerja Lulusan SMK Menurut Sektor 2018-2020.....	41
Gambar 4. 5	Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK	42
Gambar 4. 6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Sektor Sebelum dan Masa Pandemi.....	42
Gambar 4. 7	Perkiraan Pertambahan Pekerja Lulusan SMK.....	43

bagian ini dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Analisis Kepentingan dalam Kebijakan PJJ untuk Siswa SMK.....	15
Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesi 2020-2024	23
Tabel 3. 2 Fluktuasi Perubahan Jumlah Pekerja Menurut Pendidikan 2014-2019	26
Tabel 3. 3 Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan, 2019	27
Tabel 3. 4 Provinsi dengan Keunggulan Serapan Pekerja di 5 Sektor Terbesar	28
Tabel 3. 5 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Masa Sebelum Pandemi .	29
Tabel 4. 1 TPAK Agustus 2018-Agustus 2020	37
Tabel 4. 2 Jumlah dan Perubahan Angkatan Kerja 2018-2020	37
Tabel 4. 3 TPT Menurut Jenjang Pendidikan 2018-2020.....	38
Tabel 4. 4 TPT Menurut Kelompok Umur 2020	38
Tabel 4. 5 Perubahan Jumlah Pekerja Lulusan SMK Sebelum dan Selama Pandemi	40
Tabel 5. 1 Rekomendasi PJJ dalam Masa PSBB	46

bagian ini dikosongkan

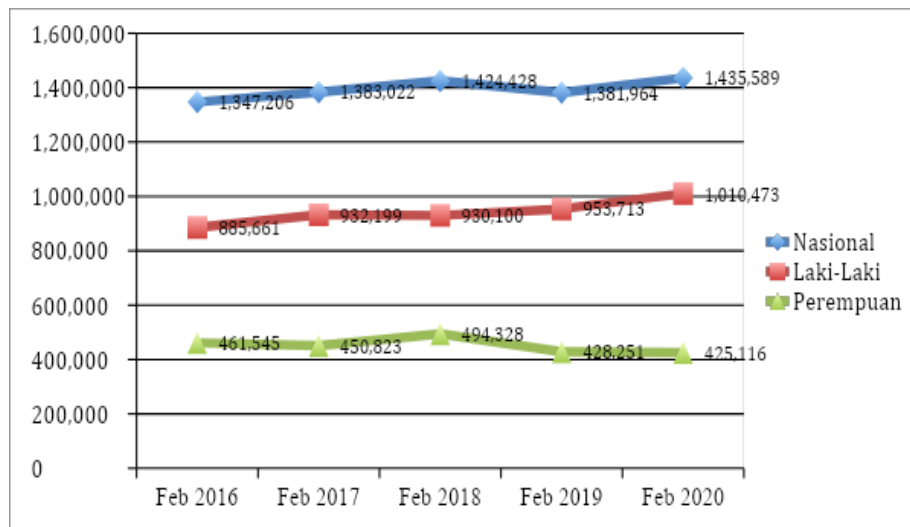
BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

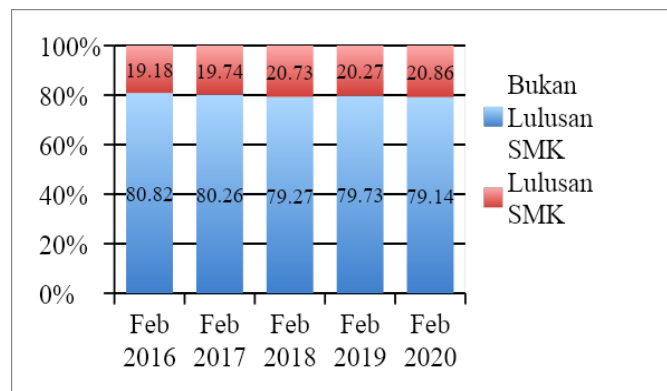
Saat ini, Indonesia sedang memasuki era bonus demografi dengan angka beban ketergantungan diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 47,3 pada tahun 2035. Era ini diperkirakan akan berlangsung dari tahun 2012-2035. Pada masa ini, jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncak pada tahun 2030 sebesar 68% dari total penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia berpenduduk angkatan kerja terbanyak. Masa ini akan menguntungkan dari sisi suplai tenaga kerja karena jumlah penduduk usia produktif mencapai angka yang cukup besar. Jumlah ini akan menjadi modal besar untuk pembangunan. Namun, masa ini akan menjadi sulit apabila kondisi penduduk muda tersebut memiliki kualitas rendah yang diikuti dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap kelebihan tambahan tenaga kerja tersebut. Hal tersebut mengubah bonus yang hadir menjadi “bencana demografi” karena tidak dapat meningkatkan investasi rumah tangga, investasi SDM, dan keuntungan ekonomi lainnya.



Sumber : Sakernas berbagai tahun

Gambar 1.1 Jumlah Pengangguran Lulusan SMK Per Februari 2016-2020

Gambaran ketenagakerjaan di Indonesia selama masa bonus demografi kurang mengembirakan karena tenaga kerja di Indonesia cenderung berkualitas sangat rendah. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP ke bawah, yaitu sebesar 77 juta orang pada tahun 2020. Sementara kelompok berpendidikan SMA dan SMK berada pada urutan kedua, yaitu sebesar 42,69 juta. Meskipun angkatan kerja berpendidikan menengah atas (umum dan kejuruan) meningkat, akan tetapi tingkat pengangguran berpendidikan SMA dan SMK masih cukup besar. Dari Februari 2016 sampai Februari 2020, ada peningkatan kontribusi pengangguran lulusan SMK terhadap pengangguran nasional (BPS, 2020). Lulusan SMK memberikan kontribusi terbesar ketiga sesudah pengangguran lulusan SMP ke bawah dan pengangguran lulusan SMA.



Sumber. Sakernas berbagai tahun

Gambar 1.2 Persentase Pengangguran Lulusan SMK Terhadap Total Pengangguran Nasional 2016-2020

Indonesia telah berupaya mengejar peningkatan kualitas SDM penduduk produktif, terutama penduduk muda dengan peningkatan jumlah penduduk berpendidikan menengah atas dan pengarahannya kepada pendidikan vokasi guna memenuhi peluang kerja di sektor-sektor yang membutuhkan. Berbagai kebijakan telah dilakukan dengan menambah jumlah SMK berbagai jurusan dan meningkatkan kualitas pendidikan SMK sehingga lulusan mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Berbagai metode pembelajaran telah dilakukan, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha untuk mengejar ketertinggalan kemajuan informasi dan teknologi yang berubah di dunia usaha. Seluruh kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi penduduk produktif di pendidikan SMK.

Data Kemendikbud menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMK meningkat dari 12.659 buah pada tahun 2015/2016 menjadi 14.064 buah pada tahun 2018/2019 dengan jumlah murid yang juga terus meningkat. Permasalahannya adalah peningkatan jumlah sekolah belum menjamin adanya peningkatan kualitas dan keterampilan lulusan sekolah tersebut. Pendidikan dan keterampilan yang diperoleh lulusan SMK dinilai masih belum memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Data Sakernas (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif berpendidikan SMA meningkat dari 22,3 juta orang tahun 2016 menjadi 25,8 juta orang tahun 2020. Sementara itu, penduduk berpendidikan SMK meningkat dari 13,7 juta tahun 2016 menjadi 16,9 juta orang tahun 2020. Untuk menyamakan jumlah lulusan SMA dengan SMK, diperlukan waktu yang cukup panjang karena SMA masih dipandang sebagai pendidikan yang lebih bergengsi dibanding pendidikan SMK. Biro Perencanaan Perindustrian (2014) menemukan bahwa dunia usaha lebih memilih lulusan SMA umum untuk pekerja di perusahaan mereka karena lulusan SMA lebih mudah untuk dibentuk dan dilatih sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa SMK harus terus mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas lulusannya.

Bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk, Indonesia terdampak dengan munculnya pandemi COVID-19¹. Pandemi yang menyebar secara global ini memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan *lockdown*. Kebijakan ini telah memicu krisis ekonomi di berbagai negara. Di antara dampak yang didapat Indonesia adalah penurunan aktivitas di beberapa sektor usaha, terutama sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, dan industri.

Jumlah kasus teridentifikasi dan kematian akibat COVID-19 cenderung terus meningkat dengan cepat. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pada 31 Maret 2020². Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional³, Pemerintah secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan *physical distancing*, karantina wilayah hingga PSBB yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah.

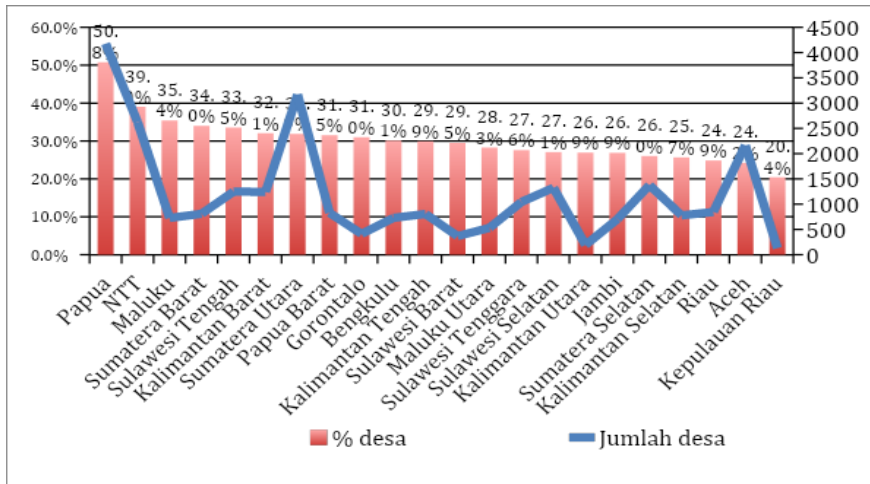
Pembelajaran dari rumah diarahkan menjadi pendidikan jarak jauh (PJJ) menggunakan sistem daring. Secara umum, PJJ merupakan salah satu upaya *homeschooling* yang harus dilakukan dengan peran aktif dari murid, orang tua, guru dan sekolah. PJJ dapat dilakukan dengan menuntut kesiapan murid dan keluarga terutama orang tua, pihak sekolah (guru dan tenaga kependidikan), pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentang kurikulum dan sistem pembelajaran, serta faktor pendukung lain, yaitu ketersediaan listrik dan jaringan internet yang menjangkau sampai ke pedesaan terpencil, kepemilikan telepon genggam dan komputer/laptop.

Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat desa-desa yang tidak terlayani oleh listrik, baik PLN maupun sumber listrik lainnya. Selain itu, tidak semua desa mempunyai jaringan internet di wilayah mereka. Dari hasil Survei Potensi Desa 2018, terdapat sebanyak 24,6% dari 29.650 desa yang tidak menggunakan listrik. Semakin ke wilayah timur Indonesia maka semakin sedikit wilayah yang teraliri listrik. Dengan ketiadaan listrik, PJJ dengan sistem daring tidak bisa dilakukan karena semua peralatan daring membutuhkan adanya jaringan listrik tersebut.

¹ *Policy paper* ini ditulis sepanjang semester II tahun 2020;

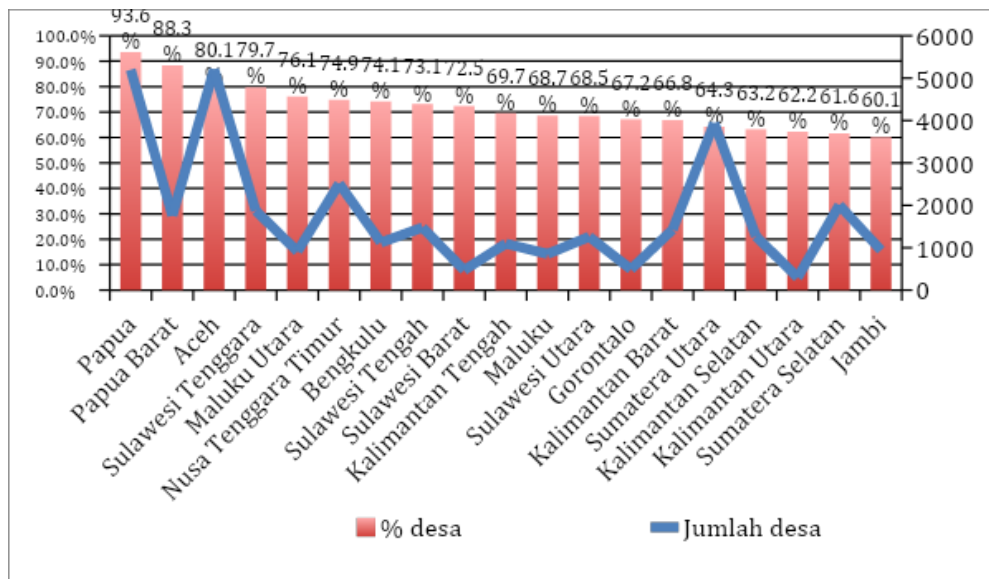
² Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19-19-19);

³ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional;



Sumber: Statistik Potensi Desa 2018. BPS, 2019.

Gambar 1.3 Provinsi dengan Lebih dari 20% Desa dan Jumlah Rumah Tangga Bukan Pengguna Listrik

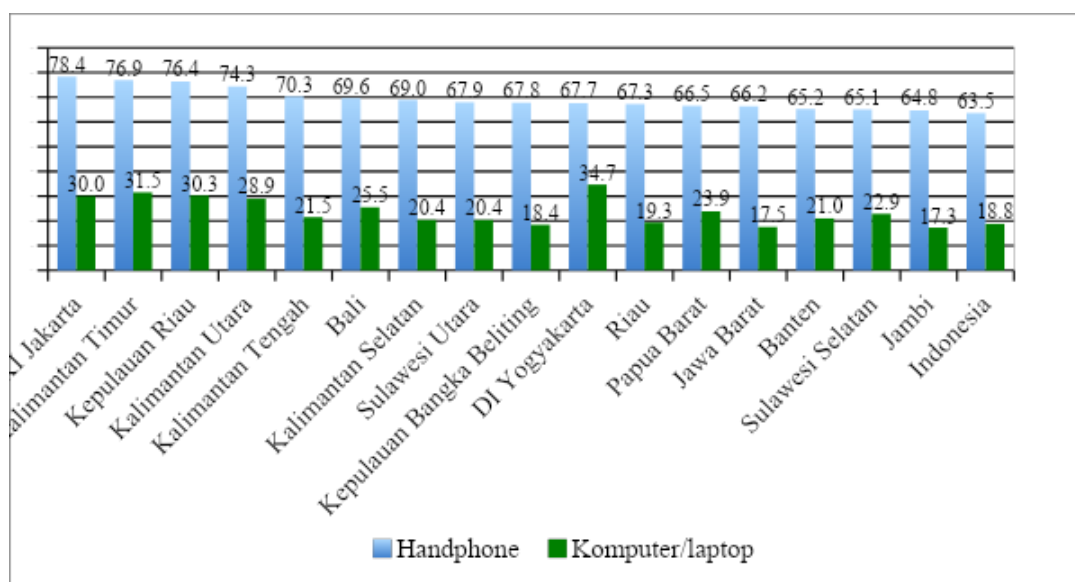


Sumber: Statistik Potensi Desa 2018. BPS, 2019.

Gambar 1.4 Jumlah dan Lebih dari 60 % Desa yang Tidak Ada BTS

Selain listrik, jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) juga menentukan kemudahan pengguna jaringan internet untuk melakukan PJJ menggunakan daring. Provinsi dengan jumlah desa di atas 60% yang tidak memiliki BTS paling banyak terdapat di Papua, Papua Barat, dan Aceh. Jika listrik tersedia tapi BTS tidak tersedia maka siswa harus pergi ke desa lain yang memiliki BTS. Sementara itu, ketersediaan transportasi, biaya, dan lain-lain belum tentu mendukung untuk pergi ke daerah yang memiliki BTS. Kondisi lain yang juga menjadi penunjang adalah kepemilikan telepon genggam dan komputer atau *laptop*. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa hanya 63,5% rumah tangga di Indonesia yang memiliki telepon genggam dan hanya 18,8% Rumah Tangga yang memiliki komputer atau *laptop* secara nasional. Variasi antar provinsi mempunyai *gap* yang cukup besar.

Kondisi ini akan menurunkan kinerja pendidikan selama masa pandemi COVID-19 dan sesudahnya, baik terhadap kualitas pembelajaran maupun kualitas peserta didik. Siswa SMK akan terdampak lebih parah karena keterbatasan penggunaan laboratorium untuk meningkatkan keterampilan. Larangan untuk datang ke sekolah melakukan praktik kerja menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas lulusan SMK terutama otomotif, elektronika, komputer/IT, dan kejuruan teknik lainnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa proyek praktik SMK dan perguruan tinggi yang harus menggunakan mesin, laboratorium, dan lain-lain maka pengerjaannya diperbolehkan di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun, tidak semua sekolah mempunyai laboratorium atau tempat praktik yang sesuai standar protokol kesehatan.



Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Edisi Mei 2020, BPS

Gambar 1.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Genggam dan Komputer/Laptop di Provinsi Di Atas Rata-Rata Nasional

Dari sisi permintaan tenaga kerja, roda ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja diprediksi berubah secara signifikan. Permintaan tenaga kerja akan menurun di beberapa sektor. Sejak tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dari 5,07% pada tahun 2017 lalu meningkat menjadi 5,17% tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 5,02% tahun 2019. Kemudian, nilai tersebut kembali turun pada triwulan I tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 mulai memasuki Indonesia. Hampir semua sektor mengalami penurunan, kecuali sektor pertanian, jasa keuangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Kondisi ini akan mengubah peta permintaan tenaga kerja dengan tuntutan lulusan yang lebih kompeten. Oleh sebab itu, kompetensi dan relevansi keahlian lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) sangat diperlukan. Kedua hal tersebut akan mengisi kebutuhan tenaga kerja sekaligus berkontribusi terhadap daya saing ekonomi dan kesejahteraan dalam ekonomi berbasis pengetahuan global (Hermo et al, 2016).

Dengan demikian, *policy paper* ini mencoba untuk melihat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja bagi lulusan SMK yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini mencakup praktik kerja sama DUDI dengan sekolah di masa pandemi dan prospek sektor-sektor industri yang berpotensi tumbuh lebih dahulu di masa pemulihan pandemi. Rekomendasi kebijakan yang disusun turut berusaha untuk menggabungkan antara sisi penawaran dan permintaan dari tenaga kerja. Dengan demikian, *policy paper* ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang memberikan rekomendasi kebijakan yang utuh.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Melihat kebijakan Pemerintah dalam menjalankan pendidikan SMK sebelum masa pandemi dan selama masa tersebut;
2. Melihat perkembangan tenaga kerja terutama lulusan SMK sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19;
3. Melihat prospek industri yang diharapkan akan tumbuh lebih awal saat masa pemulihan pandemik;
4. Mengkaji kebijakan pemerintah untuk ketenagakerjaan dalam kaitannya penyerapan tenaga kerja terutama lulusan SMK;
5. Merekomendasikan kebijakan untuk mendorong sinergi *link and match* pendidikan SMK di tengah masa pandemi ini.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kajian ini meliputi :

1. Kondisi belajar dan praktik SMK sebelum dan selama masa pandemi COVID-19;
2. Kondisi angkatan kerja berpendidikan SMK sebelum dan selama masa pandemi COVID-19;
3. Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dalam masa pandemic;
4. Gambaran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebelum dan selama masa pandemi.

bagian ini dikosongkan

BAB 2
DINAMIKA
KEBIJAKAN
PEMBELAJARAN
JARAK JAUH DAN
PENDIDIKAN
VOKASI



2.1 Pembelajaran SMK Selama Pandemi

Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 mendorong adanya penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Risiko penyebaran virus tersebut menyebabkan KBM diliburkan agar sekolah tidak menjadi kluster penyebaran virus. Kemudian, Pemerintah menyusun kebijakan KBM yang dapat mengurangi risiko penularan virus⁴. Berdasarkan kebijakan tersebut, sekolah dasar hingga perguruan tinggi memiliki dasar untuk melanjutkan KBM di tahun berjalan secara daring yang dikenal dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Praktik PJJ telah digunakan oleh Universitas Terbuka (UT) dan diujicobakan bagi siswa menengah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Namun, pemanfaatan PJJ sebagai metode pembelajaran di seluruh tingkatan pendidikan secara masif, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemberlakuan PJJ menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan karena munculnya hambatan-hambatan dalam proses KBM serta mengubah bentuk proses pembelajaran siswa SMK yang biasanya 60% praktik dan 40% teori.

2.1.1 Pelaksanaan pembelajaran praktik di masa pandemi

Pada tahun 2016, revitalisasi SMK dilakukan untuk mendukung pendidikan vokasi berbasis industri. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, Inpres tersebut diturunkan menjadi Nota Kesepahaman (MoU) lima Menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi (kemdikbud.go.id, 2016).

Ruang lingkup MoU ini meliputi: (1) upaya pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri; (2) restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri; (3) pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri; (4) fasilitator industri dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen; (5) fasilitator industri untuk penyediaan *workshop/teaching factory* dan instruktur dari industri; (6) peningkatan kompetensi guru/dosen melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan industri; serta (7)

⁴ Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan vokasi (kemenperin.go.id, 2016).

Kebijakan tersebut penting untuk menyesuaikan kebutuhan industri nasional dengan kompetensi yang diselenggarakan oleh SMK di seluruh Indonesia. Kemendikbud mencatat bahwa Indonesia memiliki 1.584.858 lulusan baru dari 14.301 sekolah SMK pada tahun 2019 dengan komposisi 25,33% (3.622 ribu) merupakan SMK Negeri dan 74,67% (10.679 ribu) merupakan SMK Swasta (Pusdatin Kemendikbud, 2020). Dengan adanya *link and match* tersebut, sistem pembelajaran serta kurikulum diharapkan dapat diperbaiki, menjadi lebih praktikal, dan sesuai dengan kondisi ideal pembelajaran SMK.

Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dan disusul dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Aturan ini menjadi landasan pengambilan kebijakan di tengah ketidakpastian sistem pembelajaran akibat adanya aturan khusus berkaitan penanganan COVID-19 dari Pemerintah Pusat.

Kemudian, aturan pelengkap dikeluarkan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19. Aturan tersebut mencakup beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembelajaran dan Praktik dan Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik SMK Tahun Pelajaran 2019/2020 serta Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Lulusan SMK Tahun Pelajaran 2019/2020;
2. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam perkembangannya, SKB keempat Menteri di atas direvisi. Revisi tersebut mengatur:

1. Daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melanjutkan belajar dari rumah (BDR);
2. Satuan pendidikan di zona kuning diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan risiko kesehatan. Dengan demikian, daerah zona hijau dan zona kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah;
3. Data zonasi didasarkan pada data satuan tugas nasional COVID-19 yang tersedia dalam laman <https://covid19.go.id/peta-risiko>;

4. Pulau-pulau kecil menggunakan zonasi khusus berdasarkan pemetaan satuan tugas provinsi/kabupaten/kota setempat.

Untuk pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif, SMK di semua zona dapat melakukannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol ini mencakup perhatian terhadap kondisi kelas, jumlah hari, dan jam pembelajaran dengan pembagian rombongan belajar yang ditentukan oleh satuan sekolah masing-masing dan kondisi medis warga SMK. Hal ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak yang berada di lingkungan satuan sekolah, dimulai dari Kepala Sekolah sebagai pengawas, tenaga pendidik sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, dan murid sebagai subjek kebijakan.

Kemudian, pelaksanaan PKL saat COVID-19 dapat dilakukan berdasarkan dua kondisi, yakni saat sudah menjalani periode PKL namun harus diberhentikan atau belum melaksanakan PKL. Pada kondisi siswa telah menjalani periode pelaksanaan PKL, beberapa kebijakan dapat dilakukan, yakni:

1. Penilaian oleh perusahaan dan pembimbing untuk dapat dinyatakan selesai melaksanakan PKL;
2. Pemberian tugas tambahan belajar dari rumah (BDR) berupa *project work* berbasis industri oleh guru pembimbing dari SMK dan Industri dan dunia kerja (IDUKA);
3. Penyelesaian PKL di waktu atau di tempat lain.

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK menjadi yang paling tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK tercatat mencapai 8,49%. TPT periode Februari 2020 sebesar 4,99%. Setelah pandemi angka pengangguran secara keseluruhan kembali meningkat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa jumlah pengangguran naik sekitar 3,7 juta orang akibat pandemi COVID-19 (Tempo, 2020).

Survei terkait tantangan pelaksanaan PJJ di masa pandemi menunjukkan bahwa 70% warga memiliki anggota yang bersekolah dan 59% dari mereka merasa banyak atau cukup banyak mengalami kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi dan metode PJJ yang menambah beban pengeluaran jika tidak diberikan bantuan/keringan oleh Pemerintah. Sebanyak 92% warga merasa sangat banyak atau cukup banyak masalah selama pelaksanaan PJJ. Sebesar 67% di antaranya mempunyai anggota keluarga yang bersekolah dan merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah daring sedangkan 20% dari mereka memiliki anggota keluarga bersekolah namun tidak memiliki akses internet (SMRC, 2020).

Dalam merespon situasi tersebut, perencanaan yang jelas dalam pembuatan kebijakan implementasi PJJ dibutuhkan. Hal ini penting untuk kelancaran pelaksanaan PJJ

sekaligus meminimalisasi angka pengangguran dari SMK akibat ketidakmampuan dalam mengoptimalkan proses PJJ tersebut. Untuk itu, Kemendikbud perlu melakukan kerja sama dengan pihak eksternal guna menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan PJJ.

2.1.2 Revitalisasi: pembentukan direktorat jenderal pendidikan vokasi

Impres No. 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK telah menginstruksikan pembuatan peta jalan pengembangan SMK. Peta ini merupakan pedoman pembuatan program-program yang berkaitan dengan kurikulum SMK dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di antara program *link and match* antara SMK dan DUDI adalah Bursa Kerja Khusus (BKK), program *Center of Excellence* Sekolah Menengah Kejuruan, Gerakan Pernikahan Masal Kampus Vokasi (Republika, 2020).

Pilar utama dalam program *link and match* SMK dan DUDI terdiri dari lima poin. Pertama adalah kurikulum yang disusun bersama kedua belah pihak. Kedua adalah dosen atau guru tamu mengajar minimal selama 50 hingga 100 jam per semester dengan kompetensi industri. Ketiga adalah program magang dirancang sejak awal masuk. Keempat adalah komitmen serapan lulusan. Kelima adalah dosen vokasi dan guru-guru SMK mendapatkan pelatihan atau *update* teknologi dari pihak industri.

Impres tersebut juga menginstruksikan pembentukan peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Sinergi ini dibutuhkan untuk meningkatkan akses lulusan SMK, akreditasi SMK serta membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Selain itu, revitalisasi SMK juga diwujudkan dalam Perpres No 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perpres tersebut memunculkan direktorat baru di Kemendikbud, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Upaya ini dapat menguatkan sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri di Indonesia. Dengan adanya perampingan struktur tersebut, birokrasi dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan dapat lebih sederhana dan efektif.

2.2 Kebijakan Industri Dalam Pembelajaran dan Praktik Kerja SMK: Sebelum dan Selama Pandemi

Sektor industri telah melakukan penyerapan tenaga kerja SMK melalui kerja sama atau pun perekrutan langsung. Dalam proses penyerapan tenaga kerja tersebut, dunia industri menemui beberapa kendala, di antaranya adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada dan karakter dan *softskill* lulusan SMK tidak sesuai dengan keinginan dunia industri.

Oleh sebab itu, dunia industri mencoba melakukan pendekatan kepada SMK agar kebutuhan dan kualitas lulusan SMK dapat sesuai.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan nota kesepahaman antara industri dan SMK. Untuk mengatasi masalah kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, pihak industri akan menyesuaikan silabus dengan program kerja industri. Pelatihan kerja tidak hanya dilakukan kepada murid, tapi juga dilakukan kepada guru SMK. Mereka akan dilatih oleh industri agar dapat memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan keahlian murid. Dukungan industri terhadap SMK juga diberikan melalui sumbangan terhadap alat-alat peraga. Hal ini akan memudahkan murid dalam beradaptasi saat kerja praktik atau kerja permanen di industri pasca lulus.

Selama masa pandemi, DUDI menyadari adanya kendala dalam pembelajaran di SMK⁵. Hambatan paling besar dalam proses mengajar adalah jam praktik siswa yang berkurang. Kondisi ini dapat membatasi *skill* murid SMK ketika pandemi. Praktik yang terbatas juga menemui hambatan karena pemberlakuan protokol kesehatan dan pengurangan jam kerja/tenaga kerja sehingga pengawasan dan pembelajaran pada praktik tidak maksimal. Di antara cara yang ditempuh oleh industri untuk mengatasi masalah di atas adalah mengadakan kelas daring kepada murid SMK.

2.3 Analisis Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan PJJ SMK

Analisis pemangku kepentingan dalam menilai persepsi dan pemosisian sebuah kebijakan dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi kebijakan. Pembuatan tabel analisis memerlukan pembobotan yang dapat melihat bagaimana pengaruh dari setiap subyek terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Asumsi utama dari pembobotan ini adalah setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh. Akan tetapi, besaran pengaruh tersebut tercermin dalam kekuatan yang dapat membentuk implementasi kebijakannya. Analisis ini membagi pembobotan menjadi tiga ukuran: tinggi, cukup, dan kurang. Tinggi menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan untuk menentukan arah kebijakan tersebut sukses atau tidak. Cukup menunjukkan pemangku kepentingan tersebut mempunyai kekuatan yang dapat membentuk arah kebijakan tersebut. Kurang menunjukkan pemangku kepentingan ini terlibat dalam kebijakan tersebut, akan tetapi hampir tidak mempunyai kekuatan yang cukup dalam membentuk arah kebijakan tersebut. Pemangku kepentingan tersebut adalah objek dari sebuah kebijakan.

⁵ Kendala ini diperoleh dari *focus group discussion* yang diadakan dengan perwakilan dunia industri: APINDO, PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk, dan PT. Schneider Electric Indonesia, Tbk pada 15 Oktober 2020;

Kebijakan yang dibahas adalah PJJ bagi siswa SMK. Pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan ini berjumlah delapan pihak, yakni kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan DUDI. Berikut tabelnya:

Tabel 2. 1 Analisis Kepentingan dalam Kebijakan PJJ untuk Siswa SMK

No	Pemangku Kepentingan	Fokus Perhatian	Harapan	Posisi atas Kebijakan PJJ SMK	Bobot Pengaruh
1	Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan untuk implementasi kurikulum darurat dari Kemendikbud • Keterbatasan SDM dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk literasi digital • Insentif untuk menjalankan kurikulum darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mencoba implementasi dengan banyak hambatan dalam pelaksanaan 	Tinggi
2	Guru	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki keterbatasan untuk menjalankan kurikulum darurat • Alokasi dana pribadi untuk mengajar • Keterbatasan literasi digital • Keterbatasan untuk menjalankan kerja praktik 	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif untuk menjalankan kurikulum darurat • Bantuan gawai karena ada guru yang memiliki 2 tugas (pengajar dan orang tua) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akomodasi kurikulum darurat dengan mengorbankan materi untuk usaha lebih 	Cukup
3	Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan kesempatan untuk praktik kerja • Kesulitan mendapatkan <i>skill</i> yang dipelajari via daring • Keterbatasan gawai dan literasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan untuk menjalankan pembelajaran daring • Dapat melakukan praktik kerja secepatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dimiliki 	Kurang
4	Orang tua siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Punya keterbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bantuan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima melakukan 	Kurang

		<p>infrastruktur dan literasi digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecemasan terhadap anak tidak terserap di dunia industri 	<p>terkait pelaksanaan PJJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terserapnya anak di dunia industri 	<p>penyesuaian-penyesuaian yang dimiliki</p>	
5	Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan untuk membuka sekolah secara tatap muka • Keterbatasan untuk menerapkan kebijakan praktik kerja • Realokasi BOS efektif dan sesuai peruntukkan-nya • Penyerapan tenaga kerja yang tidak maksimal dari DUDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah dan siswa dapat beradaptasi dengan kurikulum darurat dan kondisi pandemi • Realokasi dana BOS dapat diserap secara efektif 		Tinggi
6	Kemenperin dan Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai spesifikasi industri • DUDI kesulitan untuk menyerap tenaga kerja akibat krisis ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • DUDI menerima lulusan SMK yang dididik melalui kurikulum darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan membutuhkan penyesuaian 	Cukup
7	Asosiasi Pengusaha Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Ada hambatan dalam penyerapan tenaga kerja selama masa pra-pandemi dan pandemi. Sebelum pandemi fokus pada <i>link and match</i>. Saat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi sekolah dan penyusunan kurikulum di masa pandemi dan jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung dan memberikan <i>platform</i> untuk mendorong penyerapan tenaga kerja 	Cukup

		pandemi fokus pada kontinuitas perusahaan saat krisis			
8	DUDI	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan berkarakter dari SMK untuk dapat dikembangkan lebih lanjut • Relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri • Guru SMK butuh pemahaman mengenai realita di dunia industri • Butuh memberikan pelatihan terhadap angkatan kerja yang terdampak pandemi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada perbaikan kurikulum, termasuk program dalam jangka panjang • Kebutuhan tenaga kerja yang siap didik secara jangka panjang • Industri mau berkontribusi untuk memberikan peraga untuk pendidikan SMK • Untuk pemagangan, Industri siap menyiapkan APD dan SOP untuk membantu program magang SMK 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukung dan paham ada kendala dalam pelaksanaan magang 	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, ada tiga pemangku kepentingan yang memiliki bobot tinggi, yaitu kepala sekolah dan Kemendikbud di sisi penawaran serta dunia industri di sisi permintaan. Ketiga pihak ini memiliki kekuatan untuk membentuk kebijakan dikarenakan Kemendikbud merupakan regulator utama yang membuat kebijakan terkait PJJ melalui Ditjen Pendidikan Vokasi. Kedua, kepala sekolah sebagai subjek yang mengimplementasikan arahan dan menentukan keberhasilan kebijakan PJJ SMK. Dari sisi permintaan, DUDI adalah pihak yang paling menentukan dalam sisi penyerapan dari lulusan SMK. Saat pandemi ini, industri dapat tetap berkontribusi untuk memberikan peluang belajar praktik selain masukan untuk penyempurnaan kurikulum SMK.

Guru, siswa, dan orang tua murid adalah obyek utama dari kebijakan PJJ SMK. Guru adalah garda terdepan dalam kebijakan PJJ ini yang harus menyesuaikan diri dengan perangkat digital dan daring. Akan tetapi, keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet membuat mereka harus hadir dan menyemangati anak muridnya untuk tetap belajar. Orang tua murid akan merasa cemas bila para murid sulit untuk terserap di industri saat masa pandemi. Namun, ketiga pihak ini sepakat bahwa PJJ harus dilanjutkan untuk menghindari risiko dari pandemi. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan DUDI sepakat bahwa PJJ memiliki keterbatasan saat diterapkan bagi murid SMK. Bersamaan dengan itu, beberapa industri yang tetap membuka praktik magang bagi siswa SMK dan memberikan CSR berupa peraga dan memberikan *training of trainer* untuk guru SMK untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan industri.

BAB 3

KONDISI PEREKONOMIAN DAN KETENAGAKERJAAN LULUSAN SMK DI MASA SEBELUM PANDEMI

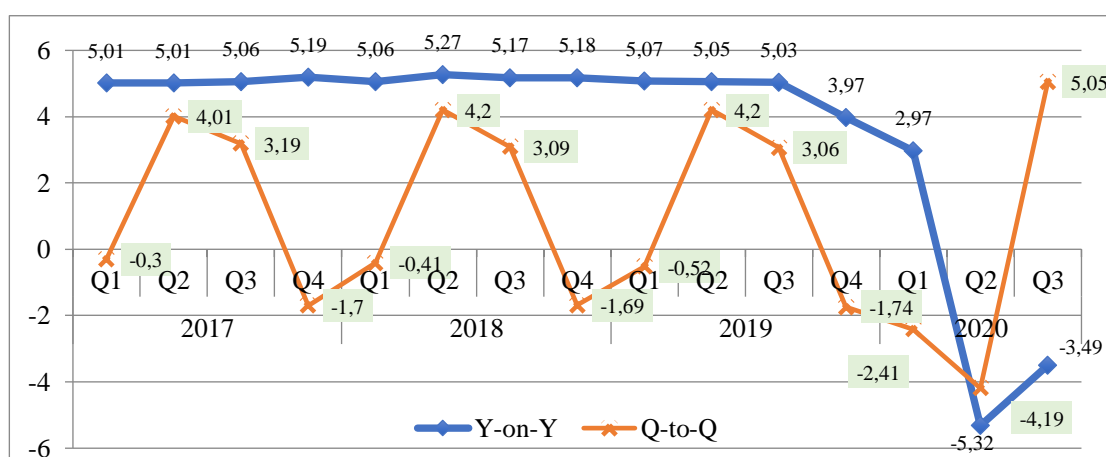


3.1 Kondisi Perekonomian Sebelum dan Selama Masa Pandemi

3.1.1 Kondisi perekonomian secara umum

Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan perekonomian secara global. Pertumbuhan ekonomi global sebelum pandemi (2019) mencapai 2,8% dan diprediksi berkontraksi sebesar -4,4% pada tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi menghantam negara maju maupun berkembang. Negara maju mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi lebih besar yaitu -5,8%, sedangkan negara berkembang berkontraksi sebesar -3,3%. Cina merupakan negara yang cepat mengalami pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar 1,9%. Kondisi perekonomian global diprediksi akan tumbuh 5,2%, sedangkan negara *emerging market* dan negara sedang berkembang mencapai kisaran 6% (IMF, Oktober 2020⁶). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh sebesar 5-6 % di tahun 2021.

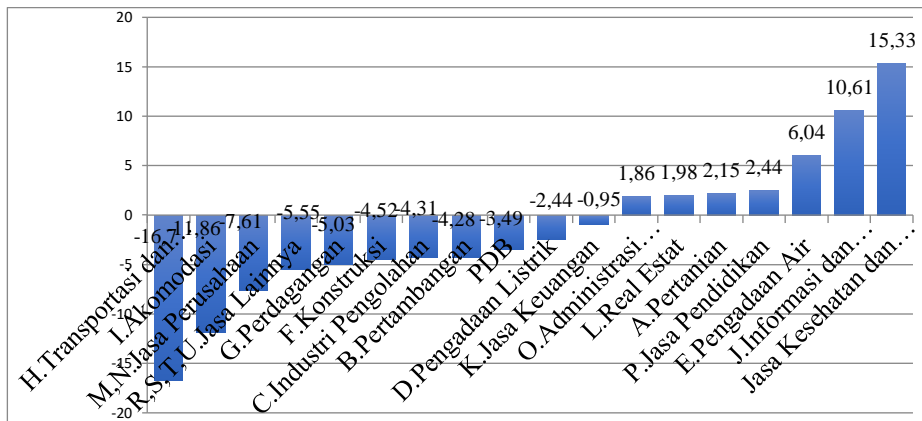
Pada kondisi sebelum pandemi, pertumbuhan PDB *y-o-y* berkisar antara 4,97% (2019) hingga 5,17% (tertinggi di tahun 2018). Angka pertumbuhan ekonomi *y-o-y* di tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -3,49% di kuartal III (Juli-September) 2020. Meskipun kondisi di kuartal III sudah lebih baik dibandingkan di kuartal ke-2 (April-Juni), namun kondisi ini belum cukup mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi kembali normal. Target pertumbuhan ekonomi saat pandemi ini jauh dari target yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 rata-rata sebesar 5,74% per tahun (RKP, 2020).



Sumber: BPS. 5 Nop 2020. Berita Resmi Statistik

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-on-Y) dan Kuartalan (Q-to-Q) 2017-2020

⁶ IMF. Oktober 2020. World Economic Outlook;

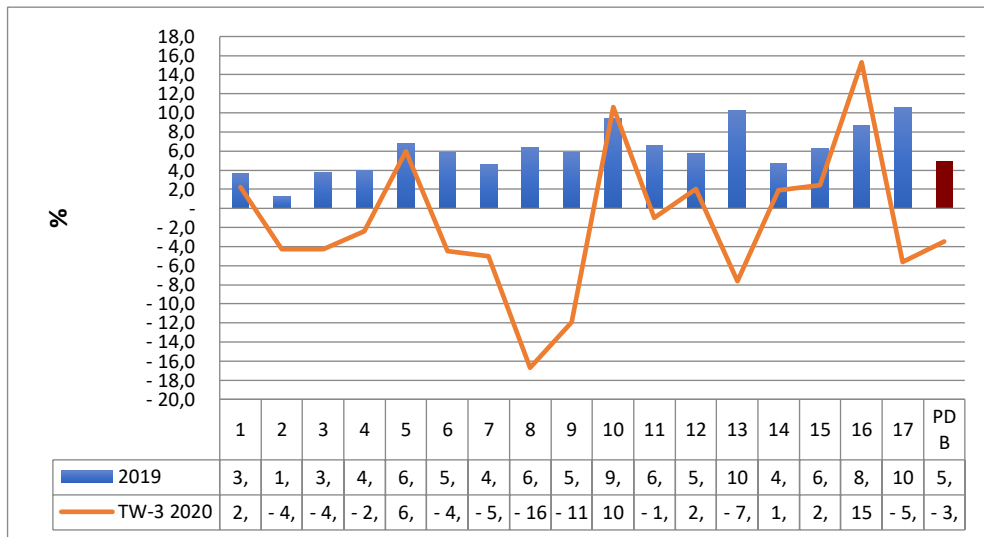


Sumber: Sumber: BPS, 5 Nop 2020, Berita Resmi Statistik

Gambar 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Y-O-Y di Triwulan III (Juli-September) 2020

Kebijakan PSBB berdampak sangat beragam pada perekonomian sektoral. Di triwulan III y-o-y 2020, sebanyak 11 dari 17 sektor mengalami kontraksi dengan kisaran -0,95% hingga -16,7%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi sangat tajam adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar -16,70% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar -11,86% kemudian jasa perusahaan sebesar -7,6%.

Ada tiga sektor yang memberikan sumbangan pada perekonomian nasional, yakni sektor industri, pertanian dan perdagangan. Dua dari tiga sektor mengalami pertumbuhan negatif yakni sektor industri (-4,3%) dan sektor perdagangan (-5,0%) akibat pandemi. Sementara itu, tujuh sektor yang tumbuh positif y-o-y di kuartal III tahun 2020, yakni sektor pertanian, sektor pengadaan air, listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor *real estate*, sektor jasa pemerintahan, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan. Sektor yang mempunyai pertumbuhan terbesar adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (15,33%), informasi dan komunikasi (10,61%), serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (6,04%).



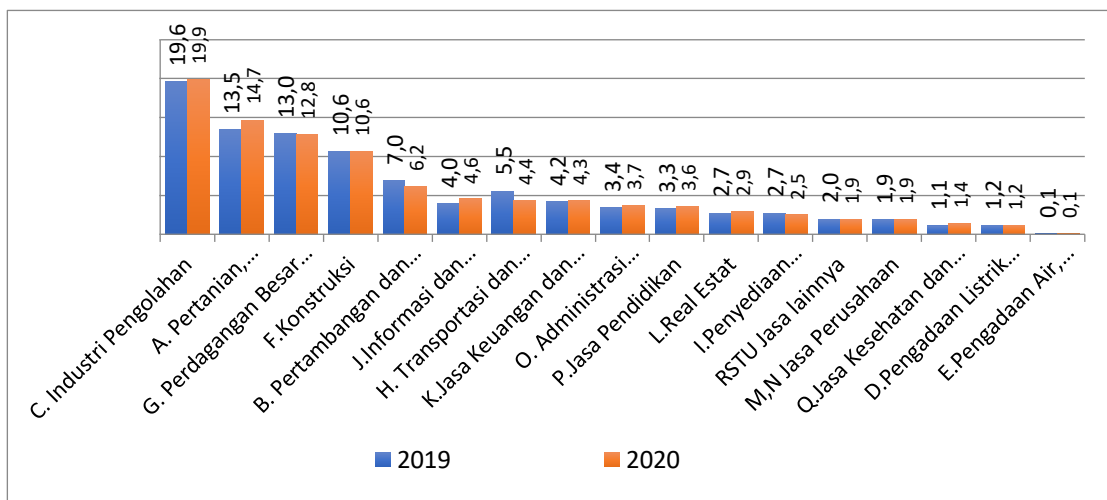
Sumber: www.bps.go.id

Gambar 3.3 Pertumbuhan Sektor 2019 dan y-o-y Triwulan III 2020

Note:

1. Pertanian, 2. Pertambangan, 3. Industri, 4. Listrik Gas, 5. Pengadaan Air, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan, 8. Transportasi, 9. Akomodasi, 10. Informasi, 11. Keuangan, 12. Real Estate, 13. Jasa Perusahaan, 14. Pemerintahan, 15. Jasa Pendidikan, 16. Kesehatan, 17. Lainnya.

Variasi pertumbuhan sektoral yang cukup besar tidak mengubah struktur PDB nasional. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Di kuartal III tahun 2020, lapangan usaha industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian sebesar 19,9 % diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,7 %, dan sektor perdagangan besar dan eceran 12,8 % (Gambar 3.1.4).



Sumber: BPS. Nov 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020 No. 85/11/Th. XXIII, 5 November 2020.

Gambar 3.4 Struktur PDB Kuartal III Tahun 2019 dan 2020

Di akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai -0,5%, jauh dari target RPJMN sebesar 5,3%. Dengan semakin membaiknya indikator-indikator

ekonomi, seperti peningkatan nilai ekspor, capaian nilai investasi Januari-November yang mencapai 86% di 2020, serta ditemukannya vaksin, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali pada kapasitas sebelumnya yakni mencapai pertumbuhan sebesar 4,5% hingga 5,0%. Perkiraan tersebut sedikit lebih rendah dari target RPJMN sebesar 5,4% di tahun 2021.

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2024

Skenario Pertumbuhan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. RPJMN	5.0	5.3	5.4	5.7	6.0	6.2
2. <i>Baseline</i> - Tanpa Krisis	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8
3. <i>Baseline</i> - Krisis	5.0	-0.5	4.5	5.0	5.0	5.0
4. <i>Reform</i>	5.0	-0.5	5.0	7.5	6.5	6.1

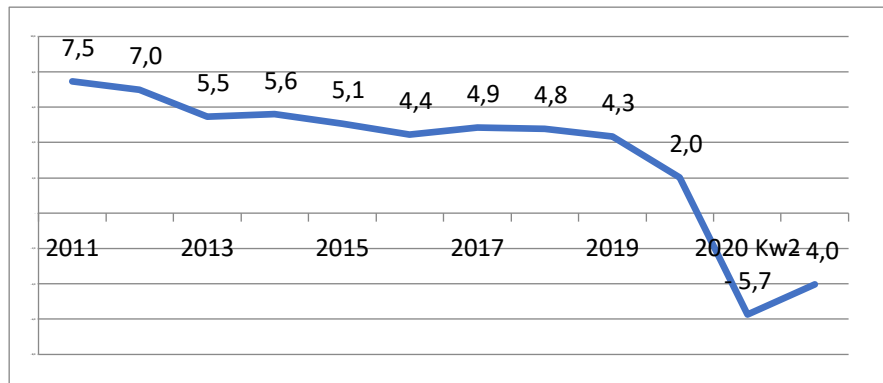
Sumber: Bappenas.

Bank Dunia (2020)⁷ memprediksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2020 turun menjadi -2,2% pada bulan Desember dari -1,6% pada bulan September. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk menekan peningkatan kasus COVID-19. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 4,4% dan menjadi 4,8% pada tahun 2022 karena vaksin telah ditemukan.

3.1.2 Kondisi industri pengolahan

Tren pertumbuhan sektor industri pengolahan (manufaktur) dalam perekonomian nasional menurun selama 10 tahun terakhir yakni dari 7,5% di tahun 2011 menjadi 4,3% di tahun 2019. Awal tahun kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan *y-o-y* semakin menurun menjadi 2,0%. Ketika kebijakan PSBB diberlakukan, pertumbuhan sektor industri pengolahan semakin terpuruk menjadi -5,7% di kuartal 2 tahun 2020. Kondisi mulai menunjukkan perbaikan di kuartal III dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan sedikit membaik menjadi -4,0% (Gambar 3.5).

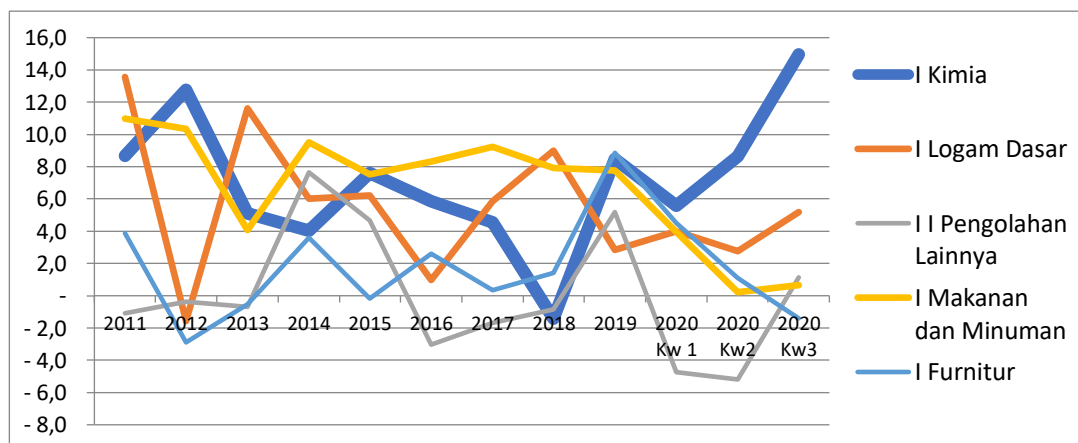
⁷ Bank Dunia. Des 2020. Indonesia Economic Prospects, Desember 2020: Menuju Pemulihan yang Aman dan Cepat;



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 3.5 Pertumbuhan Sektor Industri y-o-y 2011-2020 (%)

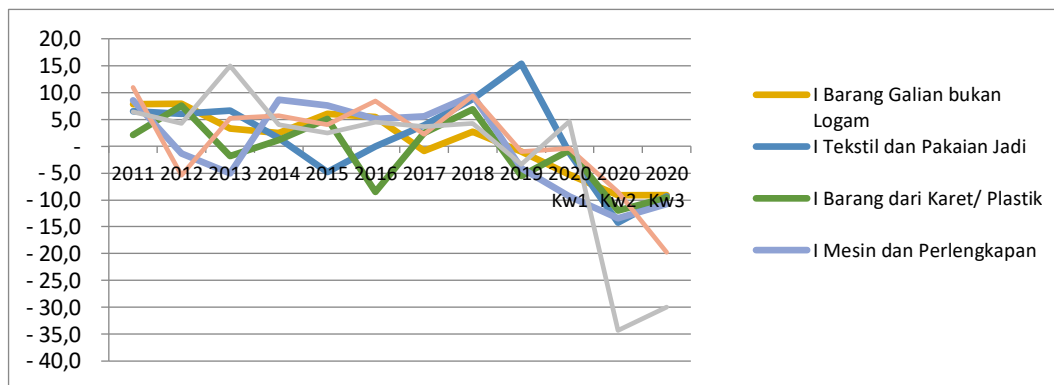
Industri pengolahan dibagi menjadi 15 subsektor. Dari 15 kelompok industri, pertumbuhan subsektor industri pengolahan sangat beragam. Terdapat lima subindustri pengolahan mengalami pertumbuhan y-o-y di atas industri nasional di kuartal III tahun 2020 (gambar 3.5). Dari lima subsektor industri tersebut, sebanyak tiga subsektor industri pengolahan yang selama pandemi masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu industri kimia, industri logam dasar, dan industri makanan dan minuman. Industri kimia, terus tumbuh sangat tinggi hingga mencapai 15% di kuartal III tahun 2020. Pertumbuhan industri logam dasar tidak terlalu terpengaruh akibat pandemi. Industri makanan mengalami pertumbuhan yang menurun tajam di kuartal II tahun 2020 dan bergerak stagnan setelahnya. Industri furnitur terus menurun dan belum menunjukkan tanda-tanda membaik di kuartal III tahun 2020.



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 3.6 Pertumbuhan Subsektor Industri 2011-2020

Di sisi lain, terdapat 9 subsektor industri pengolahan yang mempunyai angka pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan industri pengolahan secara keseluruhan (lihat Gambar 3.6). Hampir semua subsektor industri sudah menunjukkan tren membaik dibandingkan dengan triwulan III sebelumnya, kecuali industri kayu dan barang dari kayu; dan industri barang dari kulit dan alas kaki. Dua industri yang paling terpuruk adalah industri alat angkut dan industri barang dari kulit/alas kaki. Pertumbuhan industri alat angkut di kuartal 2 menurun menjadi -34,3%, dan sedikit membaik di kuartal berikutnya menjadi -30%. Pertumbuhan industri barang dari kulit/alas kaki terus menurun hingga mencapai -19,8% dan belum menunjukkan perbaikan.



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 3. 7 Pertumbuhan Industri 2011-2020

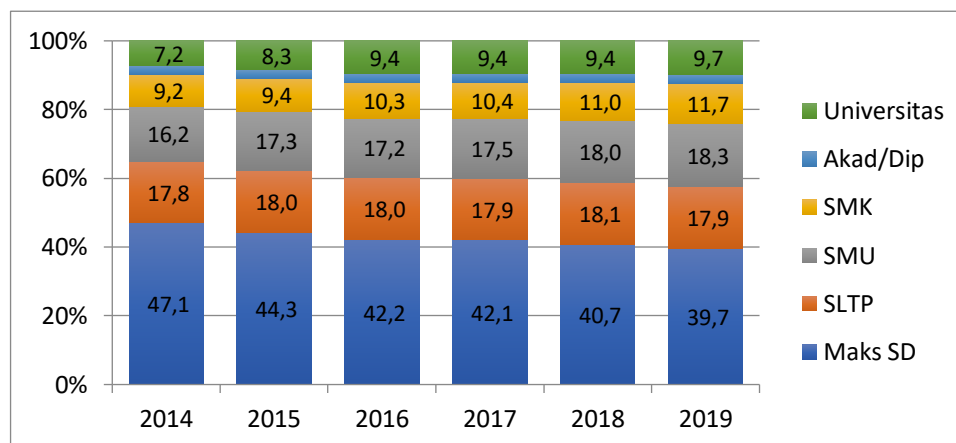
Mulai membaiknya kondisi industri manufaktur terkait dengan mulai meningkatnya *Purchasing Manager Index* (PMI) negara-negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, Jepang, negara-negara di Eropa dan ASEAN. *Output* manufaktur meningkat di bulan November karena peningkatan ekspor baru. Tiongkok, Jerman, India, Brazil dan Korea Selatan mencatatkan peningkatan dan perluasan ekspor baru. Tiongkok menjadi pendorong utama kegiatan industri dunia dengan mencatatkan nilai PMI tertinggi dalam 10 tahun terakhir (Reuters, 2020).

Kondisi manufaktur Indonesia mengalami perbaikan dilihat dari level PMI 50,6 pada bulan November 2020 yang menunjukkan perbaikan sejak Agustus 2020 (Lampiran Tabel 3.2). Peningkatan ekspektasi *output*/aktivitas bisnis yang cukup kuat merupakan aspek terbesar yang memberikan PMI Indonesia dalam kondisi aman. Peningkatan output yang disebabkan order baru, termasuk order ekspor baru. Kondisi harga-harga input dan output yang terjamin juga membuat PMI industri pengolahan dikategorikan aman (>50). Di samping itu, indikator lain, seperti penyerapan tenaga kerja, dan pembelian termasuk inventori masih belum cukup baik. Dengan demikian, peningkatan output industri pengolahan yang cukup baik tidak otomatis mampu menyerap pekerja yang baik pula karena kebijakan pembatasan sosial sehingga jumlah tenaga kerja masih belum mencapai tahap aktivitas normal.

3.2 Kondisi Ketenagakerjaan Lulusan SMK

3.2.1 Kondisi Pekerja Lulusan SMK: Sebelum Pandemi

Peningkatan *share* pekerja lulusan SMK menggantikan *share* pekerja lulusan SD dan SMP yang persentasenya terus menurun. Lulusan SMK akan bersaing dengan lulusan SMA dan Akademi/Diploma untuk bisa mendapatkan pekerjaan di pasar kerja (Gambar 3.8).



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014-2019.

Gambar 3. 8 Persentase Pekerja Menurut Pendidikan 2014-2019

Rata-rata pertambahan serapan pekerja lulusan SMK selama periode 2014-2019 sebesar 864,0 ribu orang/tahun dengan fluktuasi berkisar 316,5 ribu hingga 1159,4 ribu orang. Rata-rata serapan tersebut termasuk baik karena menempati urutan kedua setelah lulusan SMA. Secara persentase, rata-rata pertambahan sebesar 5,8% dan menempati urutan kedua setelah lulusan universitas. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya pertumbuhan jumlah penyerapan pekerja lulusan SMK (Tabel 3.2)

Tabel 3. 2 Fluktuasi Perubahan Jumlah Pekerja Menurut Pendidikan 2014-2019

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2014-19
	(x 1.000 orang)					
Maks SD	(3,128.9)	(859.8)	1,011.1	(519.4)	(280.0)	(755.4)
SLTP	347.8	659.4	358.7	708.0	194.5	453.7
SMA	1,233.6	600.0	718.0	1,205.2	854.1	922.2
SMK	316.5	1,333.0	417.3	1,094.0	1,159.4	864.0
Akad/Dip	129.7	329.7	(129.6)	164.0	(40.9)	90.6
Universitas	1,292.5	1,530.4	235.0	330.8	623.1	802.4
TOTAL	191.2	3,592.8	2,610.5	2,982.5	2,510.2	2,377.4
	(%)					
Maks SD	-5.8	-1.7	2.0	-1.0	-0.6	-1.5
SLTP	1.7	3.2	1.7	3.3	0.9	2.0
SMA	6.6	3.0	3.5	5.7	3.8	4.0
SMK	3.0	12.3	3.4	8.7	8.5	5.8
Akad/Dip	4.4	10.7	-3.8	5.0	-1.2	2.7
Universitas	15.6	16.0	2.1	2.9	5.3	6.5
TOTAL	0.2	3.1	2.2	2.5	2.0	1.9

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014-2019

3.2.2 Pekerja lulusan SMK menurut status pekerjaan

Data Sakernas 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMK bekerja sebagai buruh/karyawan yaitu sebesar 61,7%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA yang hanya mencapai 50,8%. Di samping itu, persentase status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap dan pekerja keluarga lebih rendah dibanding lulusan SMK. Hal ini mengindikasikan bahwa lulusan SMK sudah mempunyai pasar kerja yang jelas dibandingkan lulusan SMA.

Tabel 3. 3 Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan, 2019

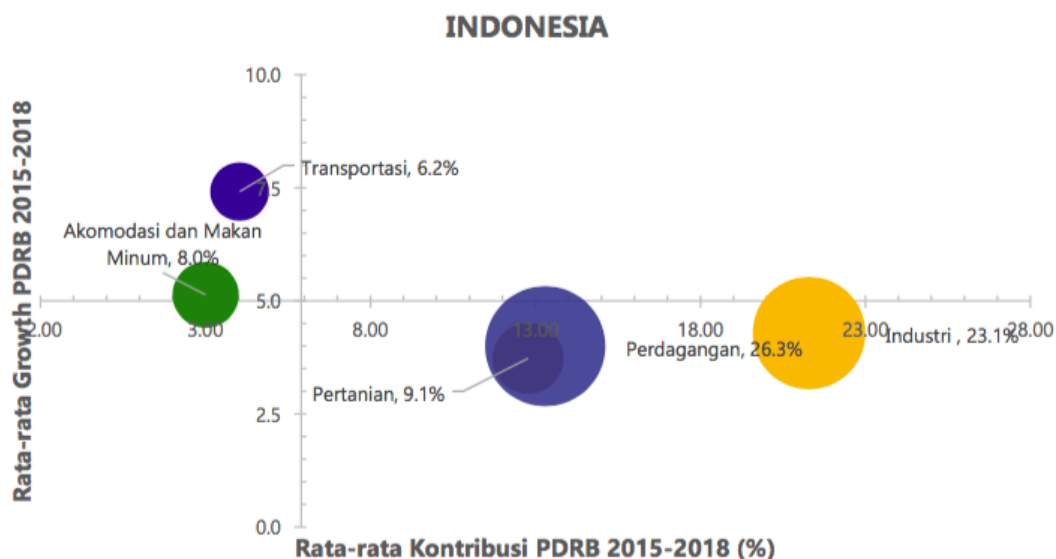
Status Pekerjaan	Maks SD	SMP	SMA	SMK	Dip	Univ	Jumlah
Formal:	23.1	38.4	55.2	65.2	78.1	86.6	44.2
Berusaha + buruh tetap	2.7	3.3	4.4	3.5	4.7	4.6	3.4
Buruh/Karyawan/Pegawai	20.4	35.1	50.8	61.7	73.4	82	40.8
Informal:	76.9	61.5	44.7	34.8	22	13.4	55.6
Berusaha Sendiri	24.5	22.3	19.7	16.3	12	6.9	20.2
Berusaha + buruh tdk tetap	22.3	13.9	10.2	7.3	5.1	3.3	14.5
Pekerja Bebas di Pertanian	7.7	3.6	1.4	1	0.2	0.1	4.1
Pekerja Bebas di Non Pertanian	7.4	7.6	3.3	3.2	0.4	0.2	5.3
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	15	14.1	10.1	7	4.3	2.9	11.5
Jumlah (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jumlah (000 orang)	50,178.4	22,619.3	23,190.6	14,840.9	3,409.7	12,276.2	126,515.1

Sumber: Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019

3.2.3 Kondisi perekonomian sektoral dan penyerapan pekerja lulusan SMK

Gambar 3.9 memperlihatkan pemetaan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK terbesar tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi PDB sektoral (17 sektor) tahun 2015-2018. Titik tengah lingkaran dari gambar di bawah merupakan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi sektor terhadap PDB kurun 2015-2018. Lima sektor yang menyerap tenaga kerja lulusan SMK terbanyak adalah sektor perdagangan (26,32%), industri pengolahan (23,09%), pertanian (9,10%), akomodasi makan dan minum (7,96%), dan transportasi (6,23%). Tingginya serapan lulusan SMK di sektor industri, perdagangan dan pertanian karena sektor tersebut memberikan kontribusi pada perekonomian sangat besar. Sedangkan serapan cukup besar di sektor akomodasi dan makanan dan sektor transportasi karena sektor tersebut mempunyai angka pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi (Lembaga Demografi, 2019)⁸.

⁸ LD-FEBUI dan Direktorat Pembinaan SMK-Kemendikbud. 2019. Analisis Potensi dan Permintaan Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian Lulusan SMK di Tingkat Provinsi;



Sumber: Lembaga Demografi FEB UI, 2019

Gambar 3.9 Serapan Pekerja Lulusan SMK dan Kondisi Perekonomian Sektor 2018

Dengan menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*) di tingkat provinsi, keunggulan serapan lulusan SMK dari lima sektor tersebut di atas dapat dilihat. Suatu sektor dikatakan unggul jika nilai $LQ > 1$ di suatu provinsi. Ada 9 provinsi yang unggul dalam serapan pekerja di sektor industri, 13 provinsi unggul di sektor perdagangan dan 15 provinsi unggul di sektor pertanian, 13 provinsi unggul di sektor akomodasi, dan 8 provinsi unggul di sektor transportasi. Ada provinsi yang unggul di kelima sektor tersebut yakni DIY, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur (Tabel 3.3).

Tabel 3.4 Provinsi dengan Keunggulan Serapan Pekerja di 5 Sektor Terbesar

No	Sektor	Keunggulan Serapan Lulusan SMK
1.	Industri	Jawa: DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur. Lainnya: Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara
2.	Perdagangan	Jawa-Bali: DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Lampung
3	Pertanian	Jawa-Bali: DIY, Bali, Sumatera: Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah Sulawesi: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Lainnya: Kepulauan Riau, Maluku, Bangka-Belitung
4.	Akomodasi, makan dan minum	Jawa Bali NTT: DKI Jakarta, DIY, Bali, Nusa Tenggara Timur, Lainnya: Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Banten
5.	Transportasi	Jawa Bali: DIY, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Timur dan Jawa Barat, Lainnya: Bangka-Belitung, Kepulauan Riau,

Sumber: Lembaga Demografi 2019

Catatan: *) Indikator unggul adalah nilai LQ serapan pekerja menurut sektor lebih dari 1.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lulusan SMK menurut sektor dapat dinyatakan dalam elastisitas permintaan tenaga kerja. Berbeda dengan permintaan pekerja lulusan SMK ketika sebelum pandemi, peningkatan output suatu sektor akan diikuti dengan peningkatan pekerja lulusan SMK. Studi yang dilakukan LD-FEB UI (2019) dengan menggunakan data jumlah pekerja 2010-2018 menunjukkan bahwa elastisitas permintaan pekerja bertanda positif untuk semua sektor. Dengan menggunakan pengelompokan 9 sektor, sektor yang elastis terhadap permintaan pekerja lulusan SMK adalah sektor perdagangan (1,00) dan jasa keuangan (1,05). Elastisitas permintaan pekerja di sektor industri 0,88 sehingga peningkatan nilai PDRB sektor industri 1% akan meningkatkan serapan pekerja 0,88 (Tabel 3.4).

Tabel 3. 5 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Masa Sebelum Pandemi

Sektor	Elastisitas
Pertanian	0.89
Pertambangan	0.49
Industri	0.88
LGAM	0.66
Konstruksi	0.79
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.00
Transportasi dan Komunikasi	0.85
Jasa Keuangan	1.05
Jasa	0.52

Sumber: Lembaga Demografi. 2019. Model permintaan tenaga kerja lulusan SMK ditentukan oleh PDRB sektor, PDRB, upah pekerja SMK, upah pekerja SMA, dan unit analisis provinsi, data 2010-2018.

bagian ini dikosongkan

BAB 4

KONDISI

KETENAGAKERJAAN

LULUSAN SMK PADA

MASA PANDEMI



4.1 Kesenjangan *Skill* Lulusan SMK

Masalah yang dihadapi oleh DUDI terhadap lulusan SMK selama ini adalah kesenjangan *skill* yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh DUDI⁹. Kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh DUDI skala menengah besar adalah lulusan SMK memiliki sertifikat kompetensi, kemampuan IT dan bahasa asing, dan pengalaman bekerja pada bidang yang sama selama 1 tahun. Kompetensi lulusan hendaknya menyesuaikan kebutuhan DUDI. Namun lulusan SMK memiliki keterbatasan kemampuan karena sarana dan prasarana sekolah yang minimal dan keterbatasan kemampuan tenaga pendidik (Perdana, N.S. 2019).¹⁰

Kerjasama antara SMK dan DUDI dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan *skill* tersebut.¹¹ Di antara bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah: (i) memberikan masukan pada kurikulum sekolah; (ii) memberikan kesempatan Praktik Kerja Lapangan dan magang bagi tenaga pendidik; dan (iii) mendukung pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur. Hal ini senada dengan Wibowo, N. (2016), Musthofa, et al (2017).¹² Akan tetapi, perusahaan memiliki keterbatasan dalam peran pembinaan terkait dengan praktik siswa/guru magang di perusahaan saat masa pandemi.

Aspek penting dari kurikulum industri adalah mendidik siswa agar memiliki *general skill* dan *soft skill*. Kurikulum tersebut harus bisa diimplementasikan ke SMK¹³. *General skill* meliputi penguasaan kemampuan dasar, seperti perbaikan alat, sedangkan *special skill* lebih fokus pada bidang kompetensi. Selain itu, siswa juga harus dibekali kemampuan analisis sehingga siswa mampu menjadi *service advisor*. Siswa juga perlu memiliki kemampuan pelayanan yang baik, *public speaking*, dan pemahaman karakter budaya industri. Jika *link and match* antara satuan pendidikan dengan pihak industri pada penerapan kurikulum industri berjalan masif maka akan menunjang pembelajaran dan meningkatkan peluang kerja bagi siswa.¹⁴

Inpres No 9 Tahun 2016 menginstruksikan kepada 12 Menteri dan BNSP serta semua gubernur di Indonesia untuk mengambil langkah-langkah untuk revitalisasi SMK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diminta menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan

⁹ *Focus group discussion* yang diadakan dengan perwakilan dunia industri: APINDO, PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk, dan PT. Schneider Electric Indonesia, Tbk pada 15 Oktober 2020;

¹⁰ Perdana, N.S. 2019. Analisis Permintaan Dan Penawaran Lulusan SMK Dalam Pemenuhan Pasar Tenaga Kerja. Refleksi Edukatika: *Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol 9 No. 2 Juni;

¹¹ *Focus group discussion*, Loc.cit;

¹² Musthofa, M.U., H. Suswanto, A. Nyoto. 2017. Analisis Praktik Kerja Industri Siswa SMK Dalam Menyesuaikan Kebutuhan Dunia Kerja. Seminar Nasional Sistem Informasi 2017, 14 September. Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang. SENASIF;

¹³ Pentingnya Sinergi Vokasi dan Para Pelaku Industri. CNN. Juni 2020;

¹⁴ Penting Penerapan Kurikulum Industri di SMK. 3 Januari 2020 <http://disdik.jabarprov.go.id/news/1832/penting%2C-penerapan-kurikulum-industri-di-smk>;

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*). Instruksi untuk Kementerian Perindustrian antara lain meningkatkan kerja sama antara dunia usaha untuk memberikan akses bagi siswa SMK untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, dan mendorong industri mendukung pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur. Sementara itu, instruksi untuk Kementerian Ketenagakerjaan antara lain adalah (i) memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktik kerja di BLK dan (ii) merevitalisasi BLK pada infrastruktur, sarana prasarana, program pelatihan dan sertifikasi.

Ditjen Pendidikan Vokasi mendukung peningkatkan kerja sama antara DUDI dan SMK ditunjukkan dengan dukungan pembiayaan program *link and match* antara SMK dengan DUDI. Program kegiatan tersebut antara lain (i) Pengembangan kerja sama SMK dengan DUDI; (ii) Penyelarasan kurikulum berbasis Industri; (iii). Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri; (iv) Pembelajaran menghadirkan guru industri di sekolah; (v) Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri; (vi) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa di industri; (vii) Proses penyerapan lulusan di Industri. Bantuan fasilitasi kemitraan tersebut diberikan secara selektif kepada SMK yang secara aktif menjalin kemitraan dengan DUDI, baik DUDI yang sedang merintis dan/atau telah menjadi pasangan bagi SMK tersebut sebesar Rp100.000.000,00 per paket untuk 60 SMK¹⁵.

Dunia industri sebagai unit usaha yang akan memanfaatkan tenaga kerja yang baru lulus, hendaknya mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan SMK membantu mengatasi kekurangan yang ada di sekolah. Komitmen DUDI sangat menentukan pembekalan siswa SMK untuk bisa mengenal budaya perusahaan sehingga bisa membekali siswa dengan *hard skill* dan *soft skill* yang diharapkan perusahaan.

Pemerintah perlu memberikan peluang bagi tenaga kerja yang dirumahkan atau PHK untuk memperoleh akses peningkatan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, terutama di bidang teknologi informasi. Selain itu, lembaga pelatihan hendaknya miliki koneksi informasi dengan informasi pasar kerja (IPK) sehingga membantu mengarahkan alumninya untuk mendapatkan pekerjaan. IPK membantu memberikan informasi kesempatan kerja yang dibutuhkan, antara lain mencakup jenis pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu sekolah juga mengenalkan mengenai Informasi Pasar Kerja.

¹⁵Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi No 05 2020 Juni Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah; Fasilitasi Kemitraan Dan Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Tahun 2020 <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/storage/document/July2020/1VwMt3HqqI EjsMX9zrug.pdf>;

Perbaikan indikator ekonomi di triwulan III (Juli-September 2020) akan diikuti oleh peningkatan utilisasi produksi dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu kebijakan Pemerintah di RKP tahun 2021 untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 adalah *re-hiring* tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan seberapa lama mereka berpengalaman kerja dan seberapa lama mereka diputus kerja sebagai penentuan *retraining*. Pelatihan juga bisa juga diprioritaskan untuk lulusan SMK yang lulus pada periode 2019-2020 agar mereka siap masuk ke pasar kerja dan mampu mengisi lowongan pekerjaan yang telah dibuka kembali. Kartu pra kerja yang sekarang berlaku hanya untuk mereka yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan dapat juga diberlakukan bagi pekerja yang menerima dampak pandemi COVID-19. Jenis pelatihan yang diberikan harus sejalan dengan rencana pengembangan industri, seperti penambahan jenis pelatihan untuk mendukung industri kimia dalam RKP 2021.

4.2 Peningkatan Kualitas Lulusan SMK Melalui Tenaga Pendidik

Strategi kerja sama industri dengan SMK¹⁶ dengan menerapkan pemagangan terpadu, dimulai dari (i) mempersiapkan landasan pengembangan industri dan sumber daya manusia, (ii) memperkuat ekosistem bagi pengembangan industri dan SDM, (iii) pertumbuhan ekonomi industri dan SDM. Dalam tahap pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan SDM, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan yakni keunggulan daya saing, penciptaan lapangan kerja, pelatihan vokasi/pemagangan terpadu dan SMK berkualitas; dan semua aspek tersebut sejalan dengan strategi industri.



Sumber: Miftahudin. Disajikan dalam FGD.

Gambar 4.1 Kolaborasi Pengembangan Sumber daya Manusia

¹⁶ Miftahudin. 2020. Kerja sama Industri dan SMK. Paparan disampaikan dalam FGD 15 Oktober 2020 oleh PAKK Bapenas;

Pengembangan SMK sebagai institusi yang menyediakan tenaga kerja hendaknya sejalan dengan dengan peta jalan industri. Tenaga pendidik juga perlu memahami dunia industri sehingga bisa memahami tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri.

4.3. Kebijakan Industri Nasional dan Implikasi Pada Pembelajaran SMK

Arah rencana pembangunan industri nasional pada 2020-2024 adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Kemudian, arah rencana pembangunan industri nasional di periode 2025-2035 adalah menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.¹⁷ Dengan arah pembangunan industri yang berbasis inovasi dan teknologi, hendaknya lulusan SMK dibekali dengan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Oleh sebab itu, penyediaan alat praktik di sekolah perlu disesuaikan dengan perkembangan di dunia industri.

Perubahan teknologi ikut mempengaruhi penyerapan pekerja di dunia usaha. Dunia usaha yang banyak menggunakan teknologi yang mengarah pada otomatisasi, seperti suatu pekerjaan yang berulang/pengulangan, akan menurunkan probabilitas penyerapan tenaga kerja. Data McKinsey menunjukkan bahwa tingkat risiko otomatisasi sangat tinggi untuk beberapa sektor, antara lain Jasa Keuangan, *Consumer staples*, *Consumer Discretionary*, Infrastruktur dan transportasi (Kemenko Perekonomian, 2017)¹⁸. Pandemi yang menuntut pengurangan interaksi sesama manusia akan semakin mempercepat proses otomatisasi. Dunia usaha melakukan substitusi sumber daya dari manusia menjadi mesin otomatisasi sehingga akan mengurangi permintaan pekerja pada jenis pekerjaan tertentu. Jenis pekerjaan yang hilang karena otomatisasi dan pertumbuhan tenaga kerja akan dibarengi dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru akibat adanya inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka kebutuhan tenaga kerja semakin besar melebihi jumlah tenaga kerja yang hilang akibat adanya otomatisasi (MGI, 2017)¹⁹. Lulusan SMK dengan kompetensi di industri kreatif, industri berketerampilan khusus, dan teknologi

¹⁷ Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2015;

¹⁸ Kementerian Perekonomian. 2017. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025;

¹⁹ MacKinsey Global Institute (MGI). 2017. Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transition In a Time of Automation;

informasi akan memiliki kesempatan berkembang paling besar di masa depan atau yang memiliki risiko minimal dampak otomatisasi (Kemenko Perekonomian, 2017).

Dalam Perpres No 86/2020 mengenai RKP 2021, arah kebijakan dan strategi sektor industri pengolahan di masa pemulihan COVID-19 pada tahun 2021 akan berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu (1) membantu industri dalam memulihkan proses produksi untuk memenuhi permintaan konsumen; (2) membantu proses *re-hiring*, *re-training* tenaga kerja; dan (3) membuka dan mempermudah akses atas impor bahan baku dan pasar ekspor. Tantangan yang dihadapi oleh lulusan SMK yang terdampak pandemi adalah kemungkinan adanya tendensi DUDI untuk *re-hiring* dan *re-training* pekerja yang telah dirumahkan atau diberhentikan dibanding merekrut lulusan SMK yang baru lulus. Hal ini dikarenakan mereka lebih mempunyai pengalaman dan tidak memerlukan *effort* yang besar untuk melatih mereka kembali.

Dalam kerangka pikir bangun Industri Nasional 2025, sumber daya sebagai modal dasar dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta. Sumber daya manusia yang diharapkan dalam mendukung industri nasional adalah mereka yang memiliki kompetensi kerja. Kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh mereka yang akan masuk sektor industri meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai di bidang industri. Oleh sebab itu, pendidikan harus menyatu dengan industri sehingga bisa mengetahui yang diinginkan oleh DUDI.

4.4 Kondisi Ketenagakerjaan di Masa Pandemi dan Implikasinya Pada Pekerja Lulusan SMK

4.4.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara umum tidak berubah sebelum dan selama pandemi, yakni sekitar 67%. TPAK menurut jenjang pendidikan menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi partisipasi dalam angkatan kerja. TPAK jenjang pendidikan SMK merupakan menempati tiga besar dengan TPAK tertinggi jenjang pendidikan universitas (minimal S1). TPAK SMK di masa pandemi (2020) sebesar 76,8% yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pola penurunan TPAK 2018-2019 tidak hanya terjadi pada jenjang SMK, melainkan juga terjadi di semua jenjang pendidikan SLTA ke atas.

Tabel 4. 1 TPAK Agustus 2018-Agustus 2020

	TPAK		
	2018	2019	2020
Tidak/belum pernah sekolah	57,91	59,20	59,62
Tidak/belum tamat SD	65,40	64,39	64,05
SD	69,65	69,22	69,62
SLTP	55,55	55,46	57,03
SLTA Umum/SMA	68,18	68,03	67,18
SLTA Kejuruan/SMK	76,18	78,24	76,78
Akademi/Diploma	75,87	76,23	76,07
Universitas	83,62	86,28	84,33
Tak Terjawab	0,00	0,00	0,00
Total	67,31	67,53	67,77

Sumber: www.bps.go.id diakses pada 6 Desember 2020.

TPAK tidak meningkat sepanjang periode 2018-2020, namun total jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah angkatan kerja periode sebelum pandemi (2018-2019) lebih besar dibandingkan dengan masa pandemi (2019-2020). Pola peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMK juga serupa. Jumlah angkatan kerja lulusan SMK di tahun 2020 sebesar 17,17 juta (2,5%). Di sisi lain, peningkatan jumlah angkatan kerja pendidikan SMK sebesar 386 ribu (7,1%) sebelum pandemik.

Tabel 4. 2 Jumlah dan Perubahan Angkatan Kerja 2018-2020

	Jumlah Angkatan Kerja (AK)			Perubahan Jumlah AK per tahun			
	(000 orang)			(000 orang)		(%)	
	2018	2019	2020	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
Tidak/blm sekolah	3506	3774	1905	268	-1869	7,6	(53,3)
TT SD	16590	16298	13772	-292	-2526	(1,8)	(15,2)
SD	32727	32461	36153	-266	3693	(0,8)	11,3
SLTP	23927	24116	25091	189	975	0,8	4,1
SMA	24632	25517	27002	886	1485	3,6	6,0
SMK	15668	16786	17172	1118	386	7,1	2,5
Diploma	3724	3680	3779	-44	99	(1,2)	2,7
Universitas	12582	13228	13347	646	119	5,1	0,9
Total	133356	135860	138222	2504	2362	1,9	1,8

Sumber: www.bps.go.id diakses 6 Desember 2020

4.4.2 Pengangguran pendidikan SMK

Angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja di masa pandemi yang terserap di pasar kerja sebanyak 92,93% dan sisanya mencari pekerjaan atau sebagai pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara umum sebesar 7,07% di masa pandemi. TPT sebelum pandemi dua poin persentase lebih rendah. Pola serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan SMK. Hal yang penting adalah nilai TPT pendidikan SMK sebelum pandemi merupakan yang tertinggi sebelum pandemi (10,4%) dan menjadi lebih tinggi

lagi (13,5%) selama pandemi. Hal ini menunjukkan lulusan SMK semakin kurang mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

Tabel 4.3 TPT Menurut Jenjang Pendidikan 2018-2020

Pendidikan	2018	2019	2010
Tidak/blm sekolah	0,92	1,08	1,65
TT SD	1,98	2,13	3,11
SD	2,78	2,67	3,90
SLTP	4,77	4,72	6,46
SMA	7,90	7,87	9,86
SMK	11,18	10,36	13,55
Diploma	6,00	5,95	8,08
Universitas	5,88	5,64	7,35
Total	5,30	5,23	7,07

Sumber: www.bps.go.id diakses 6 Desember 2020

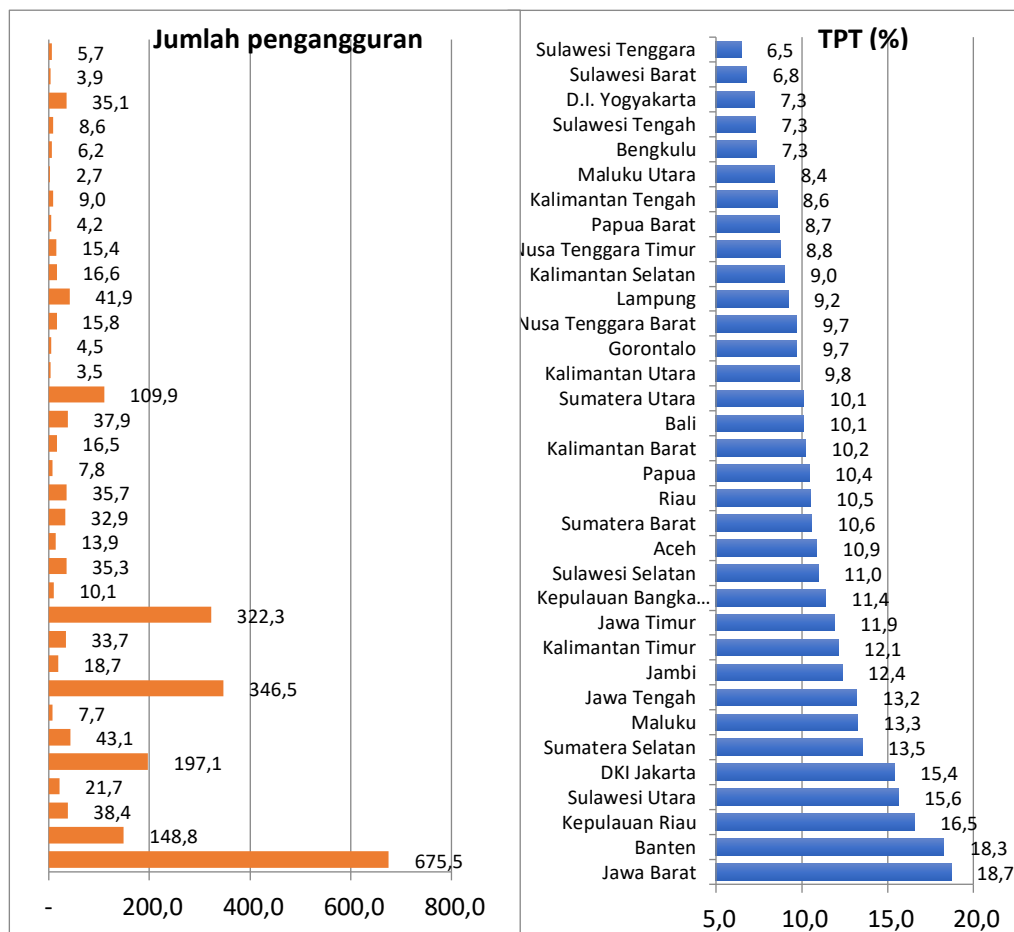
Di masa pandemi, TPT akan semakin meningkat, terutama pada usia muda. Pola ini berlaku umum untuk semua jenjang pendidikan. Di jenjang pendidikan SMK, TPT usia 15-19 tahun sebesar 38,8%. Kemudian, TPT usia 20-24 tahun sebesar 21,1%. TPT lulusan SMK yang baru menamatkan sekolah (15-19 tahun) merupakan angka yang tertinggi di semua jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK sulit untuk diterima bekerja di masa pandemi. Praktik PJJ dapat membatasi kemampuan mereka sehingga mengurangi kemungkinan mereka terserap di pasar kerja. Tingginya TPT lulusan SMK usia muda perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kemampuan dasar dan keterampilan.

Tabel 4.4 TPT Menurut Kelompok Umur 2020

Umur	Maks SMP	SMA	SMK	D1-3	Univ	Total
15 - 19	12,9	33,0	38,8	34,9	na	24,3
20 - 24	13,7	18,7	21,1	21,0	24,9	18,7
25 - 29	7,8	10,8	10,9	9,4	11,3	9,8
30 - 34	5,2	6,6	6,6	6,0	5,3	5,7
35 - 39	4,2	4,6	5,7	4,9	3,0	4,3
40 - 44	3,6	4,9	4,6	4,8	2,8	3,9
45 - 49	3,2	3,9	5,2	5,6	3,0	3,5
50 - 54	3,2	4,7	5,2	4,2	3,1	3,6
55 - 59	2,8	5,2	4,8	5,1	3,0	3,2
60 +	1,5	3,5	3,8	4,0	2,7	1,7
Jumlah	4,5	9,9	13,5	8,1	7,4	7,1

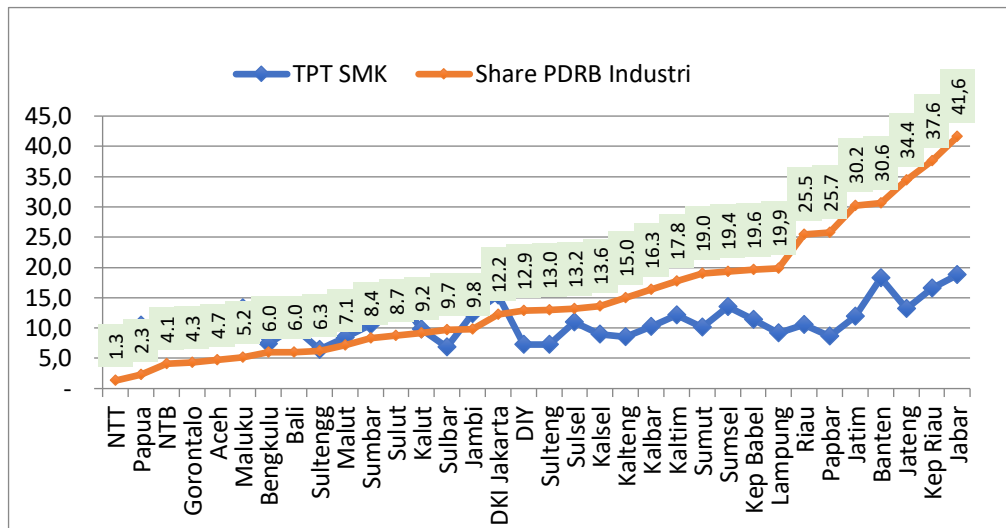
Sumber: BPS. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2020, diolah.

Nilai TPT lulusan SMK menurut provinsi sangat beragam dengan kisaran 6,5% hingga 18,7%. Wilayah yang mempunyai TPT tertinggi adalah provinsi Jawa Barat, Banten dan Kepulauan Riau. Tingginya TPT di ketiga provinsi tersebut disebabkan oleh karakteristik ketiganya sebagai kawasan industri yang terdampak pandemi. Terpuruknya sektor industri mengakibatkan tenaga kerja di daerah tersebut banyak terkena PHK atau dirumahkan, termasuk pekerja lulusan SMK. Sebaliknya daerah dengan *share* PDRB sektor industri rendah memiliki TPT pendidikan SMK rendah seperti di NTT, Papua, Aceh, dan Gorontalo. Di sisi lain, lulusan SMK di provinsi Jawa Barat adalah yang paling terpuruk. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah pengangguran dan TPT di provinsi tersebut. Tiga provinsi lain yang mempunyai jumlah pengangguran lulusan SMK terbanyak adalah provinsi Jawa Tengah (346,5 ribu), Jawa Timur (322,3 ribu) dan DKI Jakarta (197,1 ribu) (Gambar 4.2). Keempat provinsi ini perlu mendapatkan perhatian karena tingkat pengangguran yang tinggi sehingga dapat menimbulkan keresahan sosial. Kebijakan penanganan pengangguran dapat diprioritaskan pada provinsi-provinsi tersebut.



Sumber: BPS. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020, diolah.

Gambar 4. 2 TPT dan Jumlah Pengangguran Pendidikan SMK (x1.000 orang)



Sumber: TPT. BPS 2020. Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2020; Share PDRB Industri. BPS. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi 2019.

Gambar 4.3 TPT Pendidikan SMK 2020 dan Share PDRB Sektor Industri Menurut Provinsi

4.4.3 Kondisi pekerja di masa pandemi

Jumlah lulusan SMK yang bekerja per Agustus 2020 sebanyak 14,85 juta orang atau menurun sebesar 0,2 juta (-1,33%) dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, angka pertumbuhan pekerja lulusan SMK sebesar 1,13 juta (8,12%) di masa normal (2018-2019) merupakan angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Penurunan pekerja lulusan SMK di masa pandemi erat kaitannya dengan angka pertumbuhan ekonomi *y-o-y* yang mengalami kontraksi, dari sebelum pandemi sekitar 5% menjadi -3,49% di kuartal III (Juli-September) 2020.

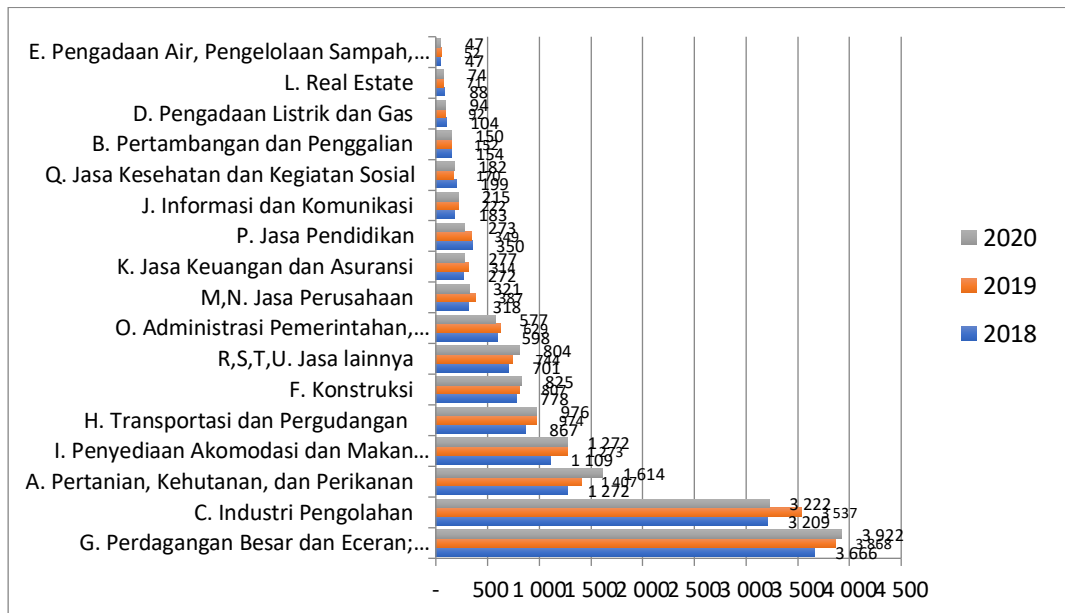
Tabel 4.5 Perubahan Jumlah Pekerja Lulusan SMK Sebelum dan Selama Pandemi

Pendidikan	Agt-18	Agt-19	Agt-20	Perubahan 2018-2019		Perubahan 2019-2020	
	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	%	Jutaan	%
SMP ke bawah	74,34	74,26	73,43	-0,08	-0,11	-0,83	-1,12
Sekolah Menengah Atas	22,69	23,51	24,34	0,82	3,61	0,83	3,53
Sekolah Menengah Kejuruan	13,92	15,05	14,85	1,13	8,12	-0,2	-1,33
PT (Diploma dan Universitas)	15,34	15,94	15,83	0,6	3,91	-0,11	-0,69
Jumlah	126,29	128,76	128,45	2,47	1,96	-0,31	-0,24

Sumber: BPS. 2020. Berita Resmi Statistik.

Dampak pandemi adalah menurunkan kinerja perekonomian dan memengaruhi penyerapan pekerja lulusan SMK. Ada tujuh sektor yang mengalami penurunan serapan pekerja lulusan SMK. Tiga sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja SMK adalah sektor industri, perdagangan dan pertanian. Dari ketiga sektor tersebut, sektor

perdagangan dan sektor industri mengalami pengurangan jumlah pekerja, sementara itu sektor pertanian meningkat penyerapan tenaga kerja (Gambar 4.6).



Sumber: www.bps.go.id Data 2018-2020 menggunakan Backcast dari Penimbang berbasis SUPAS 2015, akses 5 Des 2020, diolah

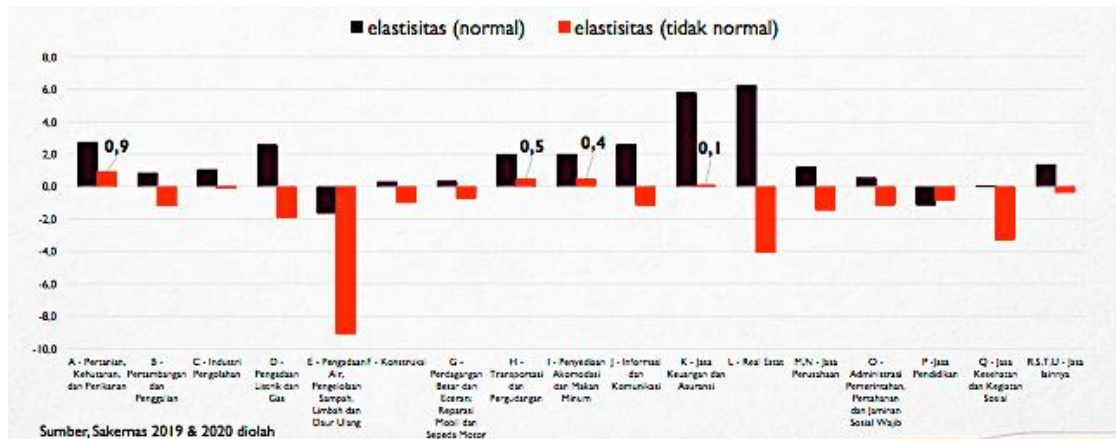
Gambar 4.4 Jumlah Pekerja Lulusan SMK Menurut Sektor 2018-2020

Sektor dengan pengurangan jumlah pekerja lulusan SMK terbanyak adalah industri pengolahan sebanyak 315 ribu orang (8,9%), jasa pendidikan sebanyak 76 ribu (21,8%) dan jasa perusahaan sebanyak 66 ribu (17%). Penurunan pekerja di industri pengolahan dan jasa perusahaan terkait dengan pertumbuhan sektor tersebut yang mengalami penurunan. Di sisi lain, pertumbuhan di sektor pendidikan justru banyak memberhentikan pekerja lulusan SMK. Penurunan penyerapan pekerja di sektor pendidikan sebenarnya terjadi sebelum pandemi, sedangkan kondisi pandemi hanya semakin mempercepat pengurangannya. Digitalisasi sektor pendidikan membuat kemampuan lulusan SMK yang kebanyakan masih pada tingkatan tata usaha kurang digunakan. Hal ini bisa menjadi salah satu sebab penurunan jumlah pekerja di sektor pendidikan.

4.4.4 Estimasi pengaruh pandemi pada serapan pekerja lulusan SMK

Estimasi elastisitas permintaan lulusan SMK dengan menggunakan model permintaan tenaga kerja lulusan SMK yang ditentukan oleh PDRB sektoral dan *dummy* (Article 33, 2020). Data jumlah pekerja yang digunakan adalah data tahun 2019 dan Februari 2020 untuk diestimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square*. Hasilnya menunjukkan bahwa elastisitas permintaan tenaga kerja lulusan SMK dalam kondisi tidak normal (masa pandemi) berbeda arah dengan elastisitas permintaan di masa normal (sebelum pandemi). Selain itu, besaran dan arah elastisitas ditentukan oleh sektor lapangan usaha. Elastisitas permintaan tenaga kerja lulusan SMK di 15 sektor lapangan

usaha bertanda positif sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan kegiatan ekonomi sektoral akan meningkatkan permintaan tenaga kerja lulusan SMK di sektor tersebut. Elastisitas dengan nilai positif terbesar terdapat di sektor Jasa Keuangan dan Real Estate, sedangkan elastisitas negatif terjadi di sektor Pendidikan dan Pengadaan Air. Selama masa pandemi, elastisitas permintaan tenaga kerja sektor untuk lulusan SMK sebagian besar bertanda negatif, kecuali empat sektor yang masih positif yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian transportasi dan pergudangan; dan Penyediaan akomodasi dan makanan/minuman.



Sumber: Article33. 2020. Kesiapan SMK dalam Menghadapi Perubahan Pasar Tenaga Kerja. (Disampaikan pada Forum Kajian Pembagian (FKP) 24 September 2020.)

Gambar 4.5 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK

Di samping itu, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan angka pertumbuhan positif. Hal ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Berdasarkan hasil estimasi permintaan tenaga kerja lulusan SMK sektor dengan angka positif terdapat pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi. Di sisi lain, ketiga belas sektor lainnya memiliki pertumbuhan tenaga kerja lulusan SMK negatif (Gambar 4.6).



Gambar 4.6 Pertumbuhan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Sektor Sebelum dan Masa Pandemi



Sumber: Article 33, 2020

Gambar 4. 7 Perkiraan Pertambahan Pekerja Lulusan SMK

bagian ini dikosongkan

BAB 5

REKOMENDASI



5.1 Kebijakan PJJ SMK dan Kebijakan Pemagangan

Pendidikan SMK membutuhkan penyesuaian sesuai pada tahapan-tahapan pandemi COVID-19. Tahapan tersebut antara lain: tahapan awal yang dikategorikan sebagai tahapan ketika seluruh sekolah dan bisnis tutup serta berada dalam darurat kesehatan (PSBB Ketat). Tahapan menengah dikategorikan sebagai tahapan PSBB transisi dimana sekolah dan bisnis mulai dibuka secara bertahap dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tahapan akhir atau pemulihan dimana vaksinasi sudah mulai diberikan dan sekolah serta bisnis mulai dibuka kembali.

Tabel 5.1 Rekomendasi PJJ dalam Masa PSBB

	Tahapan PSBB	Tahapan PSBB Transisi	Tahapan Pemulihan
Tujuan	Mengurangi kehilangan proses pembelajaran saat sekolah ditutup dan mendukung situasi tanggap darurat melalui pelatihan keterampilan jarak jauh	Mendorong pemulihan kegiatan belajar mengajar setelah sekolah dan bisnis secara bertahap dibuka kembali di fase ini	Mengembangkan respon kebijakan yang inovatif dan pelajaran yang didapat selama dua fase awal dan bangkit dengan kurikulum SMK yang lebih baik
Kebijakan	Menyediakan pembelajaran pendidikan SMK jarak jauh yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing	Sosialisasi protokol kesehatan dan standar kebersihan dalam proses Pendidikan	Menyediakan proses pembelajaran yang fleksibel
	Membentuk kurikulum darurat yang dapat melengkapi kekurangan dalam pembelajaran jarak jauh	Kolaborasi dengan industri untuk pembuatan petunjuk/pedoman kondisi keselamatan kerja untuk program magang	Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengajar SMK dengan kurikulum yang sesuai dengan dunia industri
	Melibatkan DUDI, murid, dan guru SMK dalam penyediaan keterampilan untuk situasi tanggap darurat	Mengingat pembelajaran yang diperoleh sebelum masa PSBB	Merancang program baru atau memperluas program yang sudah ada untuk mengantisipasi keterampilan yang dibutuhkan bagi industri serta dapat bekerja sama di dalamnya
	Melibatkan dunia industri, murid, dan guru SMK dalam penyediaan keterampilan untuk situasi tanggap darurat	Memberikan dukungan kesehatan mental pada siswa dan dukungan yang dibutuhkan untuk siswa rentan	Membentuk lulusan SMK yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri pada saat itu.

	Memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keahlian bagi pekerja yang (cuti atau menganggur) jika memungkinkan	Peningkatan pelibatan DUDI dalam penyelarasan kurikulum dan pengajaran SMK	Mempersiapkan kurikulum pelatihan keterampilan bagi pekerja yang mengalami PHK dan yang membutuhkan pekerjaan dengan melibatkan dunia industri
		Persiapan pelaksanaan <i>training for trainer</i> (TOT) pengajar SMK	Merancang program baru atau memperluas program yang sudah ada untuk mengantisipasi keterampilan yang dibutuhkan bagi industri serta dapat bekerja sama di dalamnya
		Menyosialisasikan protokol kesehatan dan standar kebersihan dalam proses pendidikan	Merealisasikan program-program pada tahapan PSBB dan tahapan pemulihan menjadi sebuah kebijakan sistem pengembangan keterampilan SMK

- Program praktik (*work based learning*) secara jarak jauh tetap harus dilanjutkan dengan pendekatan paling efektif guna menjangkau sebanyak-banyaknya siswa dan industri yang terlibat agar proses pendidikan tetap berlangsung. Efektif berarti sekolah/guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik murid/industri di daerahnya masing-masing. Panduan atau petunjuk dari dinas pendidikan menengah terkait untuk proses pembelajaran magang jarak jauh sangat dibutuhkan untuk hal ini.
- Pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi perlu melibatkan kolaborasi lintas sektoral termasuk lintas Kementerian. Untuk proses pemulihan, perlu memastikan pendidikan SMK menjadi bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional sebagai tenaga kerja siap kerja untuk sektor-sektor tertentu
- Mempersiapkan sistem informasi pasar kerja untuk melaksanakan survei permintaan keterampilan secara cepat dan membuat strategi pelibatan industri dan asosiasi profesi menjadi langkah pertama dalam proses tersebut.
- Memastikan kesesuaian antara sistem pembelajaran SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan kebutuhan industri.
- Mewujudkan pendidikan SMK yang dapat diakses oleh banyak orang dengan mengadakan pelatihan keterampilan yang melibatkan industri dalam menyusun kurikulum. Sistem Pendidikan SMK memiliki potensi untuk mendukung baik siswa baru dan maupun mereka yang pelatihannya terputus karena pandemi. Secara khusus, siswa yang sudah putus sekolah selama penutupan dapat tertarik dengan jangka waktu pelatihan yang lebih pendek dan praktikal.

- Membangun infrastruktur untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Pertama, melakukan investasi pada penggunaan teknologi pintar seperti penyediaan platform daring, penggabungan alat virtual dan augmented reality dalam pelatihan, penyediaan alat akreditasi keterampilan e-portfolio yang dapat meningkatkan pengalaman belajar dan membuatnya lebih fleksibel selama periode pemulihan namun dapat memfasilitasi transisi pada situasi krisis jika terjadi gangguan pada pengajaran tatap muka.

5.2 Perkembangan Ekonomi dan Penyerapan Pekerja Lulusan SMK

1. Sisi Penawaran

- Meningkatkan keterampilan kewirausahaan bagi siswa SMK sehingga mereka memiliki opsi alternatif selain bekerja sebagai buruh atau karyawan. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan persaingan di pasar kerja;
- Pemdayagunaan program Kartu Prakerja dapat diarahkan pada peningkatan kompetensi lulusan SMK. Hal ini akan membantu mengurangi pengangguran untuk lulusan SMK berusia muda di masa pandemi dan transisi. Kemudian, program magang pasca pelatihan bagi lulusan SMK juga merupakan cara agar mereka mempunyai pengalaman kerja dan bisa memahami dunia kerja di masa pandemi dan pemulihan;
- Di antara hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah:
 - Pemerintah perlu mendorong agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja dengan menambah waktu praktik lapangan;
 - Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kurikulum SMK agar sesuai dengan kebutuhan industry;
 - Menjembatani kerja sama antara SMK dan industri (baik industri besar, menengah dan kecil). Kerja sama ini dapat berbentuk: a) pemetaan kebutuhan keterampilan di industri; b) praktik magang siswa dan guru di industri; c) guru tamu dari industri; d) sinkronisasi kurikulum industri dan SMK; dan e) membantu mengembangkan *teaching factory*.
- Pelatihan keterampilan di BLK negeri atau swasta harus mencakup komponen *hard skill* dan *soft skill*.

2. Sisi Permintaan

- Hal yang dapat mendukung pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, di antaranya: (i) program intensifikasi pertanian dan mendorong *output* dengan nilai tambah yang lebih tinggi agar produktivitas sektor pertanian meningkat (untuk masa pandemi dan transisi); (ii) pembekalan dengan pemanfaatan teknologi 4.0 agar bisa mengakses pasar (untuk masa pandemi dan pasca pandemi); dan (iii) peningkatan

keterampilan lulusan SMK dengan memanfaatkan teknologi *e-commerce* di sektor pertanian (untuk masa pandemi dan pasca pandemi);

- Pemerintah dapat memfasilitas lulusan SMK tersebut dengan pelatihan yang berkaitan dengan perdagangan, misalnya pelatihan terkait *e-commerce*, digitalisasi sektor perdagangan, dan lain-lain. Hal ini dapat dilakukan sejak masa pandemi hingga masa pemulihan;
- Tren perkembangan investasi menunjukkan angka yang membaik, terutama investasi di sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, industri kimia dan farmasi serta industri makanan dan industri mineral non logam. Pemerintah perlu meningkatkan investasi di industri-industri tersebut sehingga memberikan peluang bagi lulusan SMK untuk bisa memanfaatkan kesempatan kerja baru untuk masa pandemi dan pemulihan;
- Pemerintah harus membuat terobosan kemudahan berusaha sehingga perusahaan dapat mudah melakukan investasi dan lebih meningkatkan investasi. UU Cipta Kerja dapat segera diimplementasikan untuk menarik investasi baik dalam maupun luar negeri;
- Peningkatan peran informasi pasar kerja antara lain : (i) mendorong untuk penyediaan informasi pasar kerja secara *real time* (untuk masa pandemi, transisi dan pasca pandemi); (ii) melakukan sinkronisasi informasi kebutuhan pekerja dari investasi baru (untuk masa pandemi, transisi dan pasca pandemi); dan (iii) meningkatkan kerja sama SMK dengan industri untuk peningkatan bursa kerja di SMK;
- Permintaan pekerja di sektor kesehatan, sektor informasi, komunikasi, dan sektor pengadaan air meningkat di masa pandemi. Kondisi ini adalah peluang bagi lulusan SMK untuk bisa masuk ke sektor-sektor tersebut dengan membekali dasar pengetahuan di sektor-sektor tersebut.

Pembekalan pengetahuan lulusan SMK hendaknya juga mempertimbangan keunggulan tenaga kerja sektor di masing-masing wilayah. Hal ini dapat menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemetaan sektor-sektor yang menjadi unggulan serapan pekerja tidak hanya diperlukan di tingkat provinsi, tapi juga diperlukan di tingkat kabupaten. Setiap dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi harus mengetahui sektor unggulan di wilayahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan penyerapan lulusan SMK dengan menyinkronkan kurikulum SMK dengan kebutuhan sektor unggulan.

bagian ini dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. “Survey Kegiatan Dunia Usaha”, (2020);
- Bušelić, M. “Distance Learning–concepts and contributions. *Oeconomica Jadertina*”, 2-1 (2012): 23-34;
- Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., ... & Lam, S. “COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses”. *Journal of Applied Learning & Teaching* 3-1 (2020): 1-20;
- Kotsikis, V. “Educational Administration and Policy”, *Athens: Ellin* (2007);
- Meltzer, M. I., N. J. Cox, and K. Fukuda. “The Economic Impact of Pandemic Influenza in the United States: Priorities for Intervention”, *Emerging Infectious Diseases*. 5-5 (1999);
- Musthofa, M.U., H. Suswanto, A. Nyoto. “Analisis Praktik Kerja Industri Siswa SMK Dalam Menyesuaikan Kebutuhan Dunia Kerja”, *Seminar Nasional Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang. SENASIF* (14 September 2017);
- Perdana, N.S. “Analisis Permintaan Dan Penawaran Lulusan SMK Dalam Pemenuhan Pasar Tenaga Kerja”. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 9-2 (2019);
- Putriatama, E., S. Patmanthara, R.M. “Kontribusi Pengalaman Prakerin, Wawasan Dunia Kerja Dan Kompetensi Kejuruan Melalui Employability Skill Serta Dampaknya Terhadap Kesiapan Kerja Lulusan Smk Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan Di Probolinggo”. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1-8 (2016);
- Syairaji, M., Rokhman Nur., Nuryati. “Implementasi Paradigma Pendidikan Vokasional Pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Gadjah Mada”, *Jurnal Kesehatan Vokasional* Vol. 2 (2017);
- United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization, “Revised Recommendation Concerning Technical and Vocational Education and Training”. *Paris: UNESCO* (2001);

Wibowo, N. 2016. “Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Tuntutan Dunia Industri” *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Volume 23-1 (2016).